RENCANA KERJA (RENJA)
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP)
TAHUN 2026



PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI
2025

KATA PENGANTAR

Segala puji kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang mana dengan dan atas Rahmat-Nya, penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Kediri Tahun 2026 ini dapat terselesaikan dengan baik. Semoga nantinya bisa memberi kemanfaatan.

Sebagai unsur pelaksana teknis Pemerintah Kabupaten Kediri yang bertanggung jawab di Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan, DPMPTSP mempunyai kewajiban menyusun rencana kerja selama satu tahun ke depan dalam sebuah dokumen Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2026. Dokumen ini berisikan evaluasi dan hasil kegiatan Tahun 2024 sebagai bahan analisa, juga serangkaian rencana atas program dan kegiatan yang telah disesuaikan dengan perubahan dan kebutuhan di Tahun 2026. Selanjutnya dokumen ini juga dipergunakan sebagai bahan penyusunan program dan kegiatan untuk tahun berikutnya.

Demikian dapatnya RENJA 2026 ini dipergunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan, dan dapat bermanfaat pada semua pihak yang membutuhkan dan berkepentingan. Kepada semua pihak yang telah membantu hingga terselesaikannya dokumen ini dengan baik, maka kami sampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga. Begitu pula masukan dan koreksi positif sangatlah kami harapkan guna melengkapi kesempurnaan dokumen ini.

Kediri, - - 2025
KEPALA DPMPTSP
KABUPATEN KEDIRI

JOKO SUWONO
NIP. 19750103 199311 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..... **i**

DAFTAR ISI ..... **ii**

BAB I : PENDAHULUAN **1**

1.1. Latar Belakang..... 1

1.2 Landasan Hukum..... 5

1.3 Maksud dan Tujuan..... 8

1.4 Sistematika Penulisan..... 9

BAB II : HASIL EVALUASI RENCANA KERJA TAHUN 2024 ..... **11**

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2024 dan capaian Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu..... 11

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu..... 43

2.3 Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) 45

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah..... 46

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat..... 52

BAB III : TUJUAN DAN SASARAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU..... **54**

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional..... 54

3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu..... 56

3.3 Program dan Kegiatan..... 58

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU **64**

BAB V : PENUTUP..... **71**

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Dalam pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan adanya penyempurnaan sistem perencanaan dan penganggaran pembangunan, baik pada aspek proses dan mekanisme maupun tahapan pelaksanaan musyawarah perencanaan di tingkat pusat dan daerah. Selanjutnya, sebagaimana amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, khususnya dalam Pasal 4 menyebutkan bahwa setiap Pemerintah Daerah menyusun rencana pembangunan Daerah sesuai dengan kewenangannya, dan dalam Pasal 11 ayat (1) disebutkan bahwa dalam Perencanaan pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 9 dilakukan terhadap Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dan Rencana Perangkat Daerah. Adapun Pasal 11 ayat (3) memerinci bahwa Rencana Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:

a. Renstra Perangkat Daerah; dan
b. Renja Perangkat Daerah.

Berdasarkan ketentuan di atas, maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), sebagai salah satu perangkat daerah di Kabupaten Kediri mempunyai tanggung jawab untuk menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA PD) Tahun 2026, artinya bahwa apapun bentuk program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2026 telah disusun dan tertuang dalam RENJA PD ini. Dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan yang harus disusun untuk mewujudkan sasaran kinerja yang menjadi tanggungjawab Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Rencana kinerja disusun dengan memperhatikan analisa kinerja tahun sebelumnya dan isu strategis yang harus diakomodir. Adanya Rencana Kerja Tahun 2026 sebagai panduan kegiatan, bahan untuk mengukur pencapaian target, informasi tentang tujuan, prioritas dan membantu dalam pengambilan keputusan.

Lebih lanjut, dalam penyusunan RENJA PD ini telah sesuai dengan ketentuan dan sistematika yang ditetapkan dalam PERMENDAGRI Nomor 86 Tahun 2017. Dalam proses penyusunannya, yang pertama adalah menetapkan Rancangan RENJA PD dengan mengacu pada kerangka arahan yang telah dirumuskan dalam Rancangan Awal RKPD (RANWAL RKPD). Selanjutnya, Rancangan RENJA Perangkat Daerah tersebut akan dijadikan bahan penyempurnaan Rancangan RKPD.

A. SUSUNAN ORGANISASI

Susunan Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kediri, terdiri atas:

a. Kepala Dinas
b. Sekretariat, membawahi Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Adapun Bagan Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, sebagai berikut:

BAGAN ORGANISASI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP)



B. SUMBER DAYA MANUSIA (SDM)

Sumber Daya Manusia (SDM) atau pegawai yang dimiliki oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Kediri per 30 mei 2025 sebanyak 31 orang, berdasarkan Golongan dan Tingkat Pendidikan, dengan rincian sebagai berikut:

1. Berdasarkan Golongan, terdiri dari:
   - ❖ Pegawai Golongan IV : 7 Orang
   - ❖ Pegawai Golongan III : 16 Orang
   - ❖ Pegawai Golongan II : 1 Orang
   - ❖ Pegawai Golongan I : - Orang
   - ❖ Non PNS / Honorer : 7 Orang
2. Berdasarkan Tingkat Pendidikan, terdiri dari:
   - ❖ Pendidikan S-2 : 5 orang
   - ❖ Pendidikan S-1 : 22 orang
   - ❖ Pendidikan SMA/ SMK : 4 orang
   - ❖ Pendidikan SMP : - orang
   - ❖ Pendidikan SD : - orang

C. VISI DAN MISI

❒ ***VISI***

Visi adalah pernyataan tentang gambaran situasi dan karakteristik yang ingin dicapai oleh suatu organisasi atau lembaga pada suatu waktu yang jauh kedepan. Visi organisasi yang ditetapkan menjadi visi bersama (*shared vision*) sehingga dapat membangun komitmen dan menggerakkan segala sumber daya organisasi, menciptakan makna bagi kehidupan anggota organisasi, menciptakan standar/tolok ukur keunggulan, dan sebagai motivasi pencapaian tujuan yang jauh ke masa depan.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kediri Tahun 2025-2045 dengan menetapkan arah kebijakan utama, yaitu untuk mencapai kondisi *"Kabupaten Kediri Berbudaya Luhur, Maju dan Berkelanjutan".*

Adapun Visi Bupati Kediri terpilih untuk periode Tahun 2021-2026, yang sekaligus menjadi Visi Pembangunan Pemerintah Kabupaten Kediri adalah "**Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Kediri yang Maju, Berkarakter Nasionalis-Religius, serta Sejahtera Berdasarkan Ekonomi Kerakyatan yang Didukung Birokrasi yang Melayani."**

❒ ***MISI***

Selanjutnya Visi sebagaimana tersebut di atas, dijabarkan ke dalam Misi pembangunan Pemerintah kabupaten Kediri. Adapun misi pembangunan Pemerintah Kabupaten Kediri adalah:

1. Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkarakter nasionalis-religius.
2. Reformasi birokrasi dan pelayanan publik
3. Pengembangan ekonomi kerakyatan dan peningkatan investasi daerah
4. Revitalisasi pertanian untuk ketahanan dan swasembada pangan
5. Peningkatan infrastruktur dan konekfitas antar wilayah
6. Optimalisasi kepariwisataan berbasis kearifan lokal
7. Optimalisasi tata kelola lingkungan hidup, Sumber Daya Alam (SDA), dan mitigasi bencana
8. Pengembangan seni, budaya, olahraga, dan kretifitas pemuda
9. Perwujudan kemandirian desa untuk kesejahteraan masyarakat

Dalam rangka mewujudkan Visi Pembangunan Kabupaten Kediri tersebut, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mengemban salah satu dari sembilan Misi Pembangunan Kabupaten Kediri, yaitu misi yang ketiga, sebagai berikut: **“Pengembangan ekonomi kerakyatan dan peningkatan investasi daerah”**

1.2. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Kediri Tahun 2026 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

17. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub-urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
24. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;
25. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026;
27. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
28. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2045;

29. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 18 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2026);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kediri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kediri;
31. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2025-2045;
32. Peraturan Bupati Kediri Nomor 25 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kediri Tahun 2026.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2026 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kediri dimasudkan sebagai bahan acuan untuk menentukan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu selama tahun 2026.

Dengan tersusunnya Rencana Kerja ini diharapkan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2026 dapat terlaksana dengan baik serta sesuai dengan prioritas program dan kegiatan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

Rencana Kerja Perangkat Daerah disusun dengan mengacu pada rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Strategis (Renstra) SKPD, maupun hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, dengan memperhatikan dan menimbang permasalahan yang dihadapi di bidang penanaman modal serta diharapkan mampu memenuhi harapan masyarakat Kabupaten Kediri.

❒ *MAKSUD*

Adapun maksud penyusunan Rencana Kerja DPMPTSP Kabupaten Kediri pada Tahun 2026, secara rinci adalah sebagai berikut:

1) Sebagai acuan perumusan program, kegiatan, indikator kinerja dan dana indikatif dalam Renja SKPD, sesuai dengan rencana program prioritas rancangan awal RKPD;

2) Sebagai acuan penyusunan tujuan, sasaran kegiatan, kelompok sasaran, lokasi kegiatan serta prakiraan kedepan berdasarkan program prioritas rancangan awal RKPD;
3) Sebagai acuan perumusan kegiatan alternatif dan/atau baru untuk tercapainya sasaran Renstra SKPD berdasarkan pelaksanaan Renja SKPD tahun-tahun sebelumnya.

❒ ***TUJUAN***

Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kediri Tahun 2026 ini adalah:

1) Untuk merencanakan program dan kegiatan selama Tahun 2026;
2) Untuk melakukan evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun sebelumnya dan pengendalian untuk pelaksanaan tahun berjalan;
3) Untuk mengetahui masalah, tantangan dan solusi dalam penyelenggaraan tugas;
4) Untuk merumuskan tujuan dan sasaran sesuai dengan tugas pokok dan fungsi;
5) Untuk menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi bagi para pelaksana kegiatan di Daerah.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa Rencana Kerja SKPD yang disusun diharapkan sesuai dengan kriteria dibawah ini:

a. Mengacu pada rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
b. Mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) SKPD;
c. Mengacu pada hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun sebelumnya;
d. untuk menyelaraskan dengan kondisi dan kebutuhan terhadap prioritas program dan kegiatan.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Kediri Tahun 2026, berdasarkan pada sistematika penyusunan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN
- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II : HASIL EVALUASI RENCANA KERJA TAHUN 2024

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2024 dan Capaian Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

2.4. Review terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III : TUJUAN DAN SASARAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

3.1. Telaahan terhadap kebijakan Nasional

3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perzinan Terpadu Satu Pintu

3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

BAB V : PENUTUP

BAB II
HASIL EVALUASI RENCANA KERJA TAHUN 2024

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2024 dan Capaian Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

2.1.1. Capaian Rencana Kerja Tahun 2024

Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kediri serta Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kediri, maka berkaitan dengan hasil evaluasi Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Tahun 2024, secara rinci capaian rencana kerja Tahun 2024 dapat diuraikan sebagai berikut:

Secara umum, bahwa keseluruhan/total anggaran belanja daerah Tahun 2024 yang dipertanggungjawakan kepada DPMPTSP Kabupaten Kediri sebesar Rp 7.869.748.279,00 yang terdiri dari:

a. BELANJA GAJI DAN TUNJANGAN,

   Total belanja yang diperuntukan Gaji dan Tunjangan Pegawai serta Tambahan Penghasilan PNS sebesar Rp 3.467.982.900,00, dan

b. BELANJA OPERASIONAL,

   Yaitu belanja yang diperuntukkan membiayai segenap program dan kegiatan DPMPTSP selama satu tahun anggaran, sebesar Rp 4.401.765.379,00. Anggaran sebesar tersebut dipergunakan untuk mendukung pelaksanaan sejumlah 6 (enam) program, yang terinci ke dalam kegiatan sebanyak 12 (dua belas) kegiatan, yang kesemuanya dilaksanakan oleh Bagian Sekretariat, Bidang Pengembangan dan Pengendalian Penanaman Modal, Bidang Promosi dan Sistem Informasi dan Bidang Pelayanan Perizinan Terpadu.

Lebih lanjut, hasil evaluasi realisasi pelaksanaan program dan kegiatan Tahun Anggaran 2024, secara terinci sebagai berikut :

1) **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**, Program ini merupakan program rutin urusan kesekretariatan dinas untuk mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan di tingkat kabupaten/kota agar lebih efektif, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat yang meliputi kegiatan sebagai berikut :

a. ***Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah***, sumber anggaran kegiatan ini dari Dana Alokasi Umum (DAU) dengan nilai anggaran yang disediakan sebesar Rp 923.200,00 output kegiatan yaitu Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sebanyak 10 laporan. Dari sejumlah tersebut di atas terealisasi anggaran sebesar Rp 799.000,00 atau sebesar 86,55% dengan realisasi kegiatan (output) sebanyak 10 laporan (Renja Tahun 2025, Perubahan Renja 2024, IKK 2023, LKPJ 2023, Dokumen RB, LKjIP 2023, Monev Triwulan I, II, III, IV) atau sebesar 100,00%. Adanya sisa anggaran karena efisiensi belanja kegiatan. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah terdiri dari sub kegiatan berikut:

1. **Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah**, Tujuan sub kegiatan ini untuk menciptakan sebuah pedoman yang jelas, terstruktur, dan terukur bagi pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah dalam mendukung pembangunan daerah. Dokumen perencanaan ini menjadi dasar bagi perangkat daerah dalam mengarahkan program, kegiatan, dan alokasi sumber daya untuk mencapai tujuan pembangunan yang telah ditetapkan. Sumber anggaran sub kegiatan ini dari Dana Alokasi Umum (DAU) dengan nilai anggaran yang disediakan sebesar Rp 314.500,00 output sub kegiatan yaitu Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah sebanyak 2 dokumen. Dari sejumlah tersebut di atas terealisasi anggaran sebesar Rp 290.000,00 atau sebesar 92,21% dengan realisasi sub kegiatan (output) sebanyak 2 dokumen (Renja Tahun 2025 dan Perubahan Renja 2024) atau sebesar 100,00%;
2. **Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD**, tujuan sub kegiatan ini penyusunan laporan kinerja disusun secara terintegrasi dan selaras dengan tujuan pembangunan daerah sehingga mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan efektif. sumber anggaran sub kegiatan ini dari Dana Alokasi Umum (DAU) dengan nilai anggaran yang disediakan sebesar Rp 304.600,00 output sub

kegiatan yaitu Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD sebanyak 2 laporan.

Dari sejumlah tersebut di atas terealisasi anggaran sebesar Rp 262.000,00 atau sebesar 86,01% dengan realisasi sub kegiatan (output) sebanyak 2 dokumen (IKK tahun 2023 dan LKPJ Tahun 2023) atau sebesar 100,00%;

3. **Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**, tujuan adanya sub kegiatan ini adalah untuk menilai sejauh mana perangkat daerah telah melaksanakan tugas, fungsi, dan programnya sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Evaluasi kinerja ini dilakukan untuk memastikan bahwa perangkat daerah bekerja secara efektif, efisien, dan akuntabel dalam mencapai tujuan pembangunan daerah, sumber anggaran sub kegiatan ini dari Dana Alokasi Umum (DAU) dengan nilai anggaran yang disediakan sebesar Rp 304.100,00 output sub kegiatan yaitu Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sebanyak 6 dokumen. Dari sejumlah tersebut di atas terealisasi anggaran sebesar Rp 247.000,00 atau sebesar 81,22% dengan realisasi sub kegiatan (output) sebanyak 6 dokumen (Dokumen RB, LKjIP 2023, Monev Triwulan I, II, III, IV) atau sebesar 100,00%.

b. ***Administrasi Keuangan Perangkat Daerah,*** sumber anggaran kegiatan ini dari Dana Alokasi Umum (DAU) dengan nilai anggaran yang disediakan sebesar Rp 4.049.738.815,00 output kegiatan yaitu Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah sebanyak 3 dokumen. Dari sejumlah tersebut di atas terealisasi anggaran sebesar Rp 3.869.040.434,00 atau sebesar 95,54% dengan realisasi kegiatan (output) sebanyak 3 dokumen atau sebesar 100,00%. Adanya sisa anggaran karena efisiensi belanja kegiatan, sisa gaji dan tunjangan. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah terdiri dari sub kegiatan berikut:

   1. **Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN**, tujuan adanya sub kegiatan ini adalah penyedian gaji dan tunjangan untuk ASN, sumber anggaran sub kegiatan ini dari Dana Alokasi Umum (DAU) dengan nilai anggaran yang disediakan sebesar Rp 3.467.982.900,00 output sub kegiatan yaitu Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan

Tunjangan ASN sebanyak 20 Orang/bulan. Dari sejumlah tersebut di atas terealisasi anggaran sebesar Rp 3.296.292.766,00 atau sebesar 95,05% dengan realisasi sub kegiatan (output) 19 orang/bulan atau sebesar 95,00%;

2. **Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN**, Penyediaan administrasi ini mencakup berbagai aspek yang mendukung kinerja ASN, mulai dari pengelolaan kepegawaian, pembinaan, hingga fasilitas pendukung, sumber anggaran sub kegiatan ini dari Dana Alokasi Umum (DAU) dengan nilai anggaran yang disediakan sebesar Rp 581.605.915,00 output sub kegiatan yaitu Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN sebanyak 12 dokumen. Dari sejumlah tersebut di atas terealisasi anggaran sebesar Rp 572.612.668,00 atau sebesar 98,45% dengan realisasi sub kegiatan (output) selama 12 dokumen atau sebesar 100,00%;
3. **Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD**, tujuan sub kegiatan ini untuk memastikan bahwa pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Laporan keuangan ini menjadi alat pertanggungjawaban SKPD atas penggunaan anggaran yang telah dialokasikan selama satu tahun anggaran, sumber anggaran sub kegiatan ini dari Dana Alokasi Umum (DAU) dengan nilai anggaran yang disediakan sebesar Rp 150.000,00 output sub kegiatan yaitu Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD sebanyak 1 laporan. Dari sejumlah tersebut di atas terealisasi anggaran sebesar Rp 135.300,00 atau sebesar 90,00% dengan realisasi sub kegiatan (output) sebanyak 1 laporan (laporan keuangan tahun 2023) atau sebesar 100,00%.

c. ***Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah,*** sumber anggaran kegiatan ini dari Dana Alokasi Umum (DAU) dengan nilai anggaran yang disediakan sebesar Rp 287.600,00 output kegiatan yaitu Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD sebanyak 2 laporan. Dari sejumlah tersebut di atas terealisasi anggaran sebesar Rp 287.600,00 atau sebesar 100,00% dengan realisasi kegiatan (output) sebanyak 2 laporan atau sebesar 100,00%. Adanya sisa anggaran

karena efisiensi belanja kegiatan. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah terdiri dari sub kegiatan berikut:

1. **Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD**, tujuan sub kegiatan ini penatausahaan barang milik daerah mencakup kegiatan pencatatan, pengelolaan, pemeliharaan, dan pelaporan barang-barang yang dimiliki oleh daerah sumber anggaran sub kegiatan ini dari Dana Alokasi Umum (DAU) dengan nilai anggaran yang disediakan sebesar Rp 287.600,00 output sub kegiatan yaitu Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD sebanyak 2 laporan. Dari sejumlah tersebut di atas terealisasi anggaran sebesar Rp 287.600,00 atau sebesar 100,00% dengan realisasi sub kegiatan (output) sebanyak 2 laporan atau sebesar 100,00%.

d. ***Administrasi Umum Perangkat Daerah***, sumber anggaran kegiatan ini dari Dana Alokasi Umum (DAU) dengan nilai anggaran yang disediakan sebesar Rp 1.186.469.135,00 output kegiatan yaitu Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah sebesar 100%. Dari sejumlah tersebut di atas terealisasi anggaran sebesar Rp 1.171.130.500,00 atau sebesar 98,71% dengan realisasi kegiatan (output) sebesar 100%. Adanya sisa anggaran karena efisiensi belanja kegiatan. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah terdiri dari sub kegiatan berikut:

1. **Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor**, tujuan sub kegiatan ini untuk memastikan bahwa bangunan kantor memiliki sistem listrik dan penerangan yang memadai, aman, dan efisien, sumber anggaran sub kegiatan ini dari Dana Alokasi Umum (DAU) dengan nilai anggaran yang disediakan sebesar Rp 1.497.600,00 output sub kegiatan yaitu Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan sebanyak 1 paket. Dari sejumlah tersebut di atas terealisasi anggaran sebesar Rp 1.497.600,00 atau sebesar 100,00% dengan realisasi sub kegiatan (output) sebanyak 1 paket atau sebesar 100,00%;
2. **Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor**, tujuan sub kegiatan ini adalah penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor berupa belanja modal. Focus belanja modal tahun 2024 untuk mencukupi kebutuhan sarana prasarana Mal Pelayanan Publik (MPP), sumber anggaran sub kegiatan ini dari Dana Alokasi Umum

(DAU) dengan nilai anggaran yang disediakan sebesar Rp 1.146.986.135,00 output sub kegiatan yaitu Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan sebanyak 15 paket. Dari sejumlah tersebut di atas terealisasi anggaran sebesar Rp 1.133.127.100,00 atau sebesar 98,79% dengan realisasi sub kegiatan (output) sebanyak 15 paket (2 unit CCTV analitik, 1 unit LCD Proyektor, 1 unit Mesin antrian digital, 3 unit Smart TV 50' inch dan 12 unit UPS, 36 buah Kursi Kerja, Sofa Tamu 2 seat, Sofa Tamu 3 seat, AC Central (jenis cassette 1 paket, Braket TV 1 unit, Sound System 1 paket, PC All in 15 unit, Laptop 2 unit, printer 14 unit, scanner 7 unit) atau sebesar 100,00%;

3. **Penyediaan Peralatan Rumah Tangga**, bertujuan pemenuhan kebutuhan peralatan yang mendukung kegiatan operasional dan kenyamanan dalam lingkungan rumah tangga skpd, sumber anggaran sub kegiatan ini dari Dana Alokasi Umum (DAU) dengan nilai anggaran yang disediakan sebesar Rp 9.315.100,00 output sub kegiatan yaitu Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan sebanyak 3 Paket. Dari sejumlah tersebut di atas terealisasi anggaran sebesar Rp 7.892.000,00 atau sebesar 84,72% dengan realisasi sub kegiatan (output) sebanyak 3 Paket (Spanduk, Banner, Bendera, Karangan Bunga) atau sebesar 100,00%;
4. **Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan**, sub kegiatan ini bertujuan menyediakan produk cetak dan dokumen yang diperlukan untuk mendukung kegiatan administrasi dan operasional, sumber anggaran sub kegiatan ini dari Dana Alokasi Umum (DAU) dengan nilai anggaran yang disediakan sebesar Rp 7.051.800,00 output sub kegiatan yaitu Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan sebanyak 3 Paket. Dari sejumlah tersebut di atas terealisasi anggaran sebesar Rp 7.032.100,00 atau sebesar 99,72% dengan realisasi sub kegiatan (output) sebanyak 3 Paket atau sebesar 100,00%;
5. **Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan**, sub kegiatan ini bertujuan untuk mencukupi kebutuhan literasi/ bahan bacaan, sumber anggaran sub kegiatan ini dari Dana Alokasi Umum (DAU) dengan nilai anggaran yang disediakan sebesar Rp 10.260.000,00 output sub kegiatan yaitu Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang

Disediakan sebanyak 4 Dokumen. Dari sejumlah tersebut di atas terealisasi anggaran sebesar Rp 10.260.000,00 atau sebesar 100,00% dengan realisasi sub kegiatan (output) sebanyak 4 Dokumen atau sebesar 100,00%;

6. **Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD**, sub kegiatan ini bertujuan mendukung kegiatan forum untuk berdiskusi, bertukar informasi, dan berkonsultasi mengenai isu-isu strategis, tantangan, dan solusi dalam pelaksanaan tugas (berupa makanan dan minuman), sumber anggaran sub kegiatan ini dari Dana Alokasi Umum (DAU) dengan nilai anggaran yang disediakan sebesar Rp 11.358.500,00 output sub kegiatan yaitu Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD sebanyak 12 Laporan. Dari sejumlah tersebut di atas terealisasi anggaran sebesar Rp 11.321.700,00 atau sebesar 99,68% dengan realisasi sub kegiatan (output) sebanyak 12 Laporan atau sebesar 100,00%.

e. ***Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***, sumber anggaran kegiatan ini dari Dana Alokasi Umum (DAU) dengan nilai anggaran yang disediakan sebesar Rp 169.820.229,00 output kegiatan yaitu Persentase penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintaah Daerah yang Disediakan sebesar 100%. Dari sejumlah tersebut di atas terealisasi anggaran sebesar Rp 139.114.147,00 atau sebesar 81,92% dengan realisasi kegiatan (output) sebesar 100,00%. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terdiri dari sub kegiatan berikut:

1. **Penyediaan Jasa Surat Menyurat**, sub kegiatan ini bertujuan menyediakan layanan surat menyurat yang diperlukan untuk mendukung kegiatan administrasi dan operasional sehari-hari, sumber anggaran sub kegiatan ini dari Dana Alokasi Umum (DAU) dengan nilai anggaran yang disediakan sebesar Rp 3.005.000,00 output sub kegiatan yaitu Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat sebanyak 12 Laporan.

   Dari sejumlah tersebut di atas terealisasi anggaran sebesar Rp 2.890.000,00 atau sebesar 96,17% dengan realisasi sub kegiatan (output) sebanyak 12 Laporan atau sebesar 100,00%;
2. **Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik**, sub kegiatan ini bertujuan penyediaan listrik, jaringan internet dan telepon untuk operasional kantor, sumber anggaran sub kegiatan ini

dari Dana Alokasi Umum (DAU) dengan nilai anggaran yang disediakan sebesar Rp 99.875.229,00 output sub kegiatan yaitu Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan sebanyak 12 Laporan. Dari sejumlah tersebut di atas terealisasi anggaran sebesar Rp 73.314.147,00 atau sebesar 73,41% dengan realisasi sub kegiatan (output) sebanyak 12 Laporan atau sebesar 100,00%;

3. **Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor**, sub kegiatan ini bertujuan menyediakan jasa servis sarana dan prasarana yang mendukung kelancaran operasional, sumber anggaran sub kegiatan ini dari Dana Alokasi Umum (DAU) dengan nilai anggaran yang disediakan sebesar Rp 66.940.000,00 output sub kegiatan yaitu Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan sebanyak 12 Laporan. Dari sejumlah tersebut di atas terealisasi anggaran sebesar Rp 62.910.000,00 atau sebesar 93,98% dengan realisasi sub kegiatan (output) sebanyak 12 Laporan atau sebesar 100,00%.

f. ***Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah,*** sumber anggaran kegiatan ini dari Dana Alokasi Umum (DAU) dengan nilai anggaran yang disediakan sebesar Rp 27.000.000,00 dengan output Jumlah Barang Milik Daerah (BMD) Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Dipelihara sebanyak 5 unit. Dari sejumlah tersebut di atas terealisasi anggaran sebesar Rp 26.600.595,00 atau sebesar 98,52% dengan realisasi kegiatan (output) sebanyak 5 unit atau sebesar 100,00%, dengan rincian sebagai berikut:

1. **Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan**, tujuan sub kegiatan ini menyediakan jasa servis kendaraan dinas yang mendukung kelancaran operasional, sumber anggaran sub kegiatan ini dari Dana Alokasi Umum (DAU) dengan nilai anggaran yang disediakan sebesar Rp 27.000.000,00 output sub kegiatan yaitu Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya sebanyak 5 unit. Dari sejumlah tersebut di atas terealisasi anggaran sebesar Rp 26.600.595,00 atau sebesar 98,52% dengan realisasi sub kegiatan (output) sebanyak 5 unit atau sebesar 100,00%;

2) **PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL,** tujuan program ini untuk menciptakan iklim/ lingkungan yang kondusif bagi investasi sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. sumber anggaran kegiatan ini dari Dana Alokasi Umum (DAU) dengan nilai anggaran yang disediakan sebesar Rp 360.000.000,00 output kegiatan yaitu Persentase Pelaku usaha yang diberikan insentif/fasilitas di bidang penanaman modal sebesar 25 % atau 1 pelaku usaha yang difasilitasi. Dari sejumlah tersebut di atas terealisasi anggaran sebesar Rp 352.389.600,00 atau sebesar 97,89% dengan realisasi kegiatan (output) sebesar 25 % atau 1 (satu) kesepakatan/MoU antara Pelaku Usaha Besar dengan Usaha Mikro Kecil. Kegiatan pada program ini antara lain :

a. ***Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota,*** sumber anggaran kegiatan ini dari Dana Alokasi Umum (DAU) dengan nilai anggaran yang disediakan sebesar Rp 116.717.400,00 output kegiatan yaitu Jumlah dokumen yang disusun atas penetapan pemberian fasilitas/insentif di bidang penanaman modal sebanyak 2 dokumen. Dari sejumlah tersebut di atas terealisasi anggaran sebesar Rp 112.983.400,00 atau sebesar 96,80% dengan realisasi kegiatan (output) sebanyak 2 dokumen.

   Kegiatan Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota terdiri dari sub kegiatan berikut:

   1. **Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal**, sub kegiatan ini bertujuan untuk menciptakan kerangka kebijakan yang mendukung iklim investasi yang kondusif di tingkat daerah, sumber anggaran sub kegiatan ini dari Dana Alokasi Umum (DAU) dengan nilai anggaran yang disediakan sebesar Rp 116.717.400,00 output sub kegiatan yaitu Jumlah dokumen yang disusun atas kegiatan penetapan kebijakan mengenai pemberian fasilatas/insentif dan kemudahan penanaman modal sebanyak 1 dokumen. Dari sejumlah tersebut di atas terealisasi anggaran sebesar Rp 112.983.400,00 atau sebesar 96,80% dengan realisasi sub kegiatan (output) sebanyak 1 dokumen (sebesar 100,00%) yaitu:
      1. Penyempurnaan Draf Perda Penanaman Modal. Keterlambatan penyusunan Perda Penanaman Modal dikarenakan menunggu pembahasan oleh dewan/legislatif;

2. Public Hearing Draft Perda Penanaman Modal;
3. Penilaian PTSP dan PPB.

b. ***Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota,*** sumber anggaran kegiatan ini dari Dana Alokasi Umum (DAU) dengan nilai anggaran yang disediakan sebesar Rp 243.282.600,00 output kegiatan yaitu Jumlah Dokumen Peta potensi dan peluang usaha yang disusun sebanyak 2 Dokumen.

Dari sejumlah tersebut di atas terealisasi anggaran sebesar Rp 239.406.200,00 atau sebesar 98,41% dengan realisasi kegiatan (output) sebanyak 2 Dokumen (sebesar 100,00%). Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota terdiri dari sub kegiatan berikut:

1. **Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota**, tujuan sub kegiatan ini adalah untuk menciptakan kerangka perencanaan yang terstruktur dan terarah dalam menarik, mengelola, dan mengoptimalkan investasi di tingkat kabupaten/kota, sumber anggaran sub kegiatan ini dari Dana Alokasi Umum (DAU) dengan nilai anggaran yang disediakan sebesar Rp 69.282.600,00 output sub kegiatan yaitu Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota sebanyak 1 Dokumen. Dari sejumlah tersebut di atas terealisasi anggaran sebesar Rp 67.689.700,00 atau sebesar 97,70% dengan realisasi sub kegiatan (output) sebanyak 1 Dokumen (sebesar 100,00%) yaitu:
    1. Rapat Persiapan Evaluasi Dokumen Rencana Umum Penanaman Modal TA 2017-2025;
    2. Kajian Perhitungan Proyeksi Target Investasi Kabupaten Kediri Tahun 2024-2026 serta 2027-2031
2. **Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota**, sub kegiatan ini bertujuan untuk menyediakan informasi yang komprehensif dan terstruktur mengenai peluang dan potensi investasi di tingkat kabupaten/kota, sumber anggaran sub kegiatan ini dari Dana Alokasi Umum (DAU) dengan nilai anggaran yang disediakan sebesar Rp 174.000.000,00 output sub kegiatan yaitu Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota sebanyak 1 Dokumen. Dari sejumlah tersebut di atas terealisasi anggaran sebesar Rp 171.716.500,00 atau sebesar 98,69% dengan realisasi

sub kegiatan (output) sebanyak 1 Dokumen (sebesar 100,00%) yaitu:

- Kajian Investmen Project Ready to Offer (I-PRO) Industri Olahan Berbahan Dasar Buah di Kabupaten Kediri;
- Pemutakhiran Data Potensi Investasi pada aplikasi SIDAPOTIK (Sistem Informasi Data Potensi Investasi Terintegrasi Kabupaten Kediri)
- Kegiatan Kemitraan Berusaha, diantaranya:
  a. Amaze Group dengan PT Asada Putra Mandiri, mencakup kegiatan kerjasamakebutuhan penyediaan produk chemical;
  b. Front One Inn Hotel Kediri dengan PT Asada Putra Mandiri, mencakup kegiatan kerjasamakebutuhan penyediaan produk chemical;
  c. Hotel de Pratnya dengan PT Asada Putra Mandiri, mencakup kegiatan kerjasamakebutuhan penyediaan produk chemical;
  d. PT Sinar Kediri Sakti (Industri Furniture) dengan UD Budi Luhur (Produksi Kayu)
  e. PT Sinar Kediri Sakti (Industri Furniture) dengan PT Rukun Semangat Abadi (packaging katon box);
  f. PT Rukun Semangat Abadi (packaging katon box) dengan GTT (tahu dan turunannya);
  g. PT Rukun Semangat Abadi (packaging katon box) dengan Ratu Kartika (Minuman Sari Nanas);
  h. PT Rukun Semangat Abadi (packaging katon box) dengan CV Indopertama (makanan Frozen);
  i. PT Rukun Semangat Abadi (packaging katon box) dengan Candaria (Olahan Nanas);
  j. Favehotel Kediri dengan Gendhiswangi (sachet desain custom untuk gula, kopi hotel)
  k. Front One Inn Hotel Kediri dengan Gendhiswangi (sachet desain custom untuk gula, kopi hotel);
  l. Hotel de Pratnya dengan Gendhiswangi (sachet desain custom untuk gula, kopi hotel);
  m. Amaze Group dengan Gendhiswangi (sachet desain custom untuk gula, kopi hotel);

n. Favehotel Kediri dengan CV Indopertama (makanan frozen);
o. Amaze Group dengan CV Indopertama (makanan frozen);
p. Hotel de Pratnya dengan CV Indopertama (makanan frozen);
q. Front One Inn Hotel Kediri dengan CV Indopertama (makanan frozen);

3) **PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL,** program ini bertujuan untuk mempromosikan potensi investasi, keunggulan kompetitif, dan kemudahan yang ditawarkan oleh suatu daerah dengan kegiatan antara lain :

a. ***Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota****,* sumber anggaran kegiatan ini dari Dana Alokasi Umum (DAU) dengan nilai anggaran yang disediakan sebesar Rp 431.391.600,00 dengan target output adalah Jumlah media promosi, market inteligent, publikasi dan kegiatan promosi yang dilakukan sebanyak 2 kegiatan. Dari sejumlah tersebut di atas terealisasi anggaran sebesar Rp 410.552.026,00 atau sebesar 95,17% dengan realisasi kegiatan (output) sebanyak 2 kegiatan atau sebesar 100,00%. Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota terdiri dari sub kegiatan berikut:

1. **Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota**, tujuan sub kegiatan ini adalah untuk memperkenalkan potensi investasi yang tersedia di berbagai sektor, sumber anggaran sub kegiatan ini dari Dana Alokasi Umum (DAU) dengan nilai anggaran yang disediakan sebesar Rp 431.391.600,00 output sub kegiatan yaitu Jumlah kegiatan promosi ke Pengusaha/Investor yang dilaksanakan sebanyak 2 kegiatan. Dari sejumlah tersebut di atas terealisasi anggaran sebesar Rp 410.552.026,00 atau sebesar 95,17% dengan realisasi sub kegiatan (output) sebanyak 2 kegiatan (promosi langsung ke perusahaan dan pameran investasi) yaitu:
    1. Pameran investasi diantaranya: Pameran Festival Budaya Kuno Kini Peringatan Hari Jadi Kabupaten Kediri Ke-1220; Apkasi Otonomi Expo (AOE) 2024; Jogja Expo 2024; ITTI EXPO TAHUN 2024; Jogja Invite 2024

2. Promosi langsung ke perusahaan diantaranya:
   - ✓ Koperasi Produsen Petani Lereng Gunung Buthak (Arbilest Coffee), Mangga podang dan nanas menjadi pilihan alternative varian rasa dan aroma pada kopi, mengingat produk olahan kopi dari Koperasi Produsen Petani Lereng Gunung Buthak (Arbilest Coffee) sangat inovatif. Koperasi Produsen Petani Lereng Gunung Buthak (Arbilest Coffee) memberikan kesempatan untuk memberikan pelatihan pengolahan kopi dan pemasaran bagi petani kopi, karang taruna dan UMKM di wilayah Kabupaten Kediri.
   - ✓ Pusat Oleh-Oleh Bu Rudi Jalan Dharmahusada Nomor 144 Kota Surabaya. Ada peluang untuk membangun dan menjalin kemitraan antara kedua obyek Kunjungan promosi langsung dengan umkm yang ada di Kabupaten Kediri meliputi produk makanan dan minuman, keripik, manisan, kopi, teh, dan makanan khas lainnya, Kerajinan Tangan: Batik, anyaman, ukiran, dan produk kerajinan lainnya, Tekstil: Kain tenun, kain batik, dan pakaian khas, Souvenir: Magnet kulkas, gantungan kunci, dan pernak-pernik lainnya, dengan metode keuntungan Bagi Hasil.

4) PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL, tujuan dari program ini adalah mempermudah proses perizinan dan pelayanan dengan kegiatan meliputi :

a. ***Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota***, sumber anggaran kegiatan ini dari Dana Alokasi Umum (DAU) dengan nilai anggaran yang disediakan sebesar Rp 781.411.000,00 dengan target output adalah Prosentase ijin dan pemenuhan komitmen terbit dan selesai sebesar 78%. Dari sejumlah tersebut di atas terealisasi anggaran sebesar Rp 728.559.484,00 atau sebesar 93,24% dengan realisasi kegiatan (output) sebesar 100% (sebesar 128,21%). Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota terdiri dari sub kegiatan berikut:

1. **Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik**, tujuan dari sub kegiatan ini adalah untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam proses perizinan berusaha serta memberikan dukungan dan bimbingan kepada pelaku usaha dalam memahami dan memenuhi persyaratan perizinan berusaha yang sesuai dengan tingkat risiko usahanya, sumber anggaran sub kegiatan ini dari Dana Alokasi Umum (DAU) dengan nilai anggaran yang disediakan sebesar Rp 673.569.000,00 output sub kegiatan yaitu Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik sebanyak 10.000 pelaku usaha. Adapun jenis izin yang dilayani merupakan izin usaha yang diproses melalui https://oss.go.id/ dan aplikasi SIMPATIK, sebanyak 11 jenis izin daerah yang dilayani yaitu:
    1) Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKKPR);
    2) Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) Berusaha;
    3) Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL);
    4) Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PKPLH);
    5) KKLH;
    6) Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) Non Berusaha;
    7) Izin Pemasangan Reklame;
    8) Izin Pemakaian Kekayaan Daerah;
    9) Izin Instalatur Kabel Rumah;
    10) Izin Galian untuk Penggelaran Kabel Telekomunikasi;
    11) Izin Pengumpulan Barang dan Uang.

    Dari sejumlah tersebut di atas terealisasi anggaran sebesar Rp 633.285.984,00 atau sebesar 94,02% dengan realisasi sub kegiatan (output) sebanyak 22.900 pelaku usaha (sebesar 100,00%). Pada sub kegiatan ini kegiatan teknis yang dilakukan yaitu:
    - Pembuatan aplikasi Kesatu

- Pendampingan izin
- Pelayanan Keliling Joss. Jumlah NIB terbit: 22.117 NIB
- Kegiatan Rutin Untuk ATK, Belanja Cetak, Lembur, Honor Tenaga Administrasi (CS).

2. **Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko**, sumber anggaran sub kegiatan ini dari Dana Alokasi Umum (DAU) dengan nilai anggaran yang disediakan sebesar Rp 107.842.000,00 output sub kegiatan yaitu Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik sebanyak 1000 orang. Dari sejumlah tersebut di atas terealisasi anggaran sebesar Rp 95.273.500,00 atau sebesar 88,35% dengan realisasi sub kegiatan (output) sebanyak 3.184 orang (sebesar 318,40%).
   Pada sub kegiatan ini kegiatan teknis yang dilakukan yaitu: laporan SKM sebanyak 2 laporan (Semester ganjil dan semester genap) dan layanan konsultasi perizinan berusaha.

5) PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL, Program ini bertujuan untuk menciptakan pengawasan yang efektif dan efisien terhadap investasi yang dilakukan, baik oleh investor domestik maupun asing, meliputi kegiatan sbb :

a. ***Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota****,* sumber anggaran kegiatan ini dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) dengan nilai anggaran yang disediakan sebesar Rp 669.598.300,00 (DAU sebesar Rp 57.911.300,00 dan DAK sebesar Rp 611.687.000,00) dengan target output adalah Jumlah perusahaan yang dilaksanakan pengendalian sebanyak 474 Perusahaan. Dari sejumlah tersebut di atas terealisasi anggaran sebesar Rp 563.963.683,00 atau sebesar 94,22% dengan realisasi kegiatan (output) sebanyak 579 Perusahaan (sebesar 122,15%). Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota terdiri dari sub kegiatan berikut:

1. **Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya**, sumber anggaran sub kegiatan ini dari Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar dengan nilai anggaran yang disediakan sebesar Rp

91.752.000,00 output sub kegiatan yaitu Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya sebanyak 14 Kegiatan Usaha. Dari sejumlah tersebut di atas terealisasi anggaran sebesar Rp 77.415.000,00 atau sebesar 84,37% dengan realisasi sub kegiatan (output) sebanyak 74 Kegiatan Usaha yang didampingi dalam pengisian LKPM.

2. **Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha**, tujuan dari sub kegiatan ini adalah untuk meningkatkan kapasitas dan kompetensi pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya, serta memastikan bahwa mereka memahami dan mematuhi peraturan dan kebijakan yang berlaku sumber anggaran sub kegiatan ini dari Dana Alokasi Khusus (DAK) dengan nilai anggaran yang disediakan sebesar Rp 336.429.000,00 output sub kegiatan yaitu Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebanyak 400 pelaku usaha. Dari sejumlah tersebut di atas terealisasi anggaran sebesar Rp 310.992.875,00 atau sebesar 92,44% dengan realisasi sub kegiatan (output) sebanyak 440 perusahaan (sebesar 110,00%). Pada sub kegiatan ini kegiatan teknis yang dilakukan yaitu:
   - Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan Pengawasan Perizinan Berbasis Resiko sebanyak 4 kali;
   - Bimbingan Teknis Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) Tahun 2024 sebanyak 4 kali;

3. **Pengawasan Penanaman Modal**, sub kegiatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa pelaksanaan penanaman modal berjalan sesuai dengan peraturan, kebijakan, dan tujuan pembangunan yang telah ditetapkan, sumber anggaran sub kegiatan ini dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) dengan nilai anggaran yang disediakan sebesar Rp 241.417.300,00 (DAU sebesar Rp 57.911.300,00 dan DAK sebesar Rp 183.506.000,00), output sub kegiatan yaitu Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku

Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku DIlakukan Inspeksi Lapangan; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha sebanyak 60 Kegiatan Usaha. Dari sejumlah tersebut di atas terealisasi anggaran sebesar Rp 175.555.808,00 atau sebesar 72,72% dengan realisasi sub kegiatan (output) sebanyak 65 Kegiatan Usaha (sebesar 108,33%).

6. **PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL,** Program ini bertujuan untuk mendukung pengambilan keputusan yang berbasis data, meningkatkan transparansi, dan memfasilitasi pelayanan yang lebih baik kepada investor meliputi kegiatan sbb :

   a. ***Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota,*** sumber anggaran kegiatan ini dari Dana Alokasi Umum (DAU) dengan nilai anggaran yang disediakan sebesar Rp 193.108.400,00 dengan target output adalah Jenis Penyajian Data dan Informasi perizinan sebanyak 4 jenis. Dari sejumlah tersebut di atas terealisasi anggaran sebesar Rp 154.900.536,00 atau sebesar 80,21% dengan realisasi kegiatan (output) sebanyak 4 jenis (sebesar 100,00%). Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota terdiri dari sub kegiatan berikut:

      1. **Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik**, tujuan sub kegiatan ini adalah untuk memastikan bahwa data dan informasi perizinan berusaha dikelola, disajikan, dan dimanfaatkan secara efektif dan efisien melalui sistem yang terintegrasi dan berbasis elektronik sumber anggaran sub kegiatan ini dari Dana Alokasi Umum (DAU) dengan nilai anggaran yang disediakan sebesar Rp 193.108.400,00 output sub kegiatan yaitu Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan sebanyak 3 Dokumen.

         Dari sejumlah tersebut di atas terealisasi anggaran sebesar Rp 154.900.536,00 atau sebesar 80,21% dengan realisasi sub kegiatan (output) sebanyak 3 Dokumen (sebesar 100,00%) yaitu:

- Sosialisasi Pemantapan Regulasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Bagi Usaha Mikro di kecamatan Plemahan sebanyak 50 Pelaku Usaha dan Sosialisasi Pemantapan Regulasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Bagi Usaha Mikro di kecamatan Plosoklaten sebanyak 50 Pelaku Usaha;
- Penyusunan Buku Perizinan dan Investasi Tahun 2023;
- Updating Website dan Pengelolaan Rutin media sosial DPMPTSP;
- Publikasi Kegiatan dinas melalui media cetak dan elektronik (TV).

Berikut Rekapitulasi Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Target pada Rencana Kerja Tahun 2024

Tabel Capaian Kinerja Sub Kegiatan/ Rencana Kerja
DPMPTSP Kabupaten Kediri Tahun 2024

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	(%)
I.	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100%**	**100%**	**100**
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10 Laporan	10 Laporan	100
1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dokumen	2 dokumen	100
1.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 laporan	2 laporan	100
1.3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 dokumen	6 dokumen	100
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah	3 dokumen	3 dokumen	100
2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	20 Orang/bulan	19 Orang/bulan	95
2.2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen	100
2.3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	1 laporan	100
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi barang milik daerah pada	2 laporan	2 laporan	100

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	(%)
		perangkat daerah			
3.1	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 laporan	2 laporan	100
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100%	100
4.1	*Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor*	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	100
4.2	*Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor*	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	15 Paket	15 Paket	100
4.3	*Penyediaan Peralatan Rumah Tangga*	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	100
4.4	*Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan*	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	100
4.5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4 Dokumen	4 Dokumen	100
4.6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	100
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintaah Daerah yang Disediakan	100%	100%	100
5.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	100
5.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	100
5.3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	100
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah (BMD) Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Dipelihara	6 unit	6 unit	100
6.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 unit	5 unit	100
II.	**Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal**	**Persentase Pelaku usaha yang diberikan insentif/fasilitas di bidang penanaman modal**	**25,00**	**25,00**	**100**
7	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang	Jumlah dokumen yang disusun atas penetapan	2 dokumen	2 dokumen	100

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	(%)
	Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	pemberian fasilitas/insentif di bidang penanaman modal			
7.1	Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah dokumen yang disusun atas kegiatan penetapan kebijakan mengenai pemberian fasilatas/insentif dan kemudahan penanaman modal	1 dokumen	1 dokumen	100
8	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen RUPM, Peta potensi dan peluang usaha yang disusun	1 dokumen	1 dokumen	100
8.1	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	1 dokumen	1 dokumen	100
8.1	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota.	1 dokumen	1 dokumen	100
III.	**Program Promosi Penanaman Modal**	**Prosentase pelaksanaan strategi dan kegiatan promosi yang dilaksanakan**	**100,00**	**100,00**	**100**
9	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah media promosi, market inteligent, publikasi dan kegiatan promosi yang dilakukan	2 kegiatan	2 kegiatan	100
9.1	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	2 dokumen	2 dokumen	100
IV.	**Program Pelayanan Penanaman Modal**	**Prosentase pelayanan perizinan dan non perizinan secara terpadu satu pintu**	**100%**	**100%**	**100**
10	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Prosentase ijin dan pemenuhan komitmen terbit dan selesai	78%	100%	129.87
10.1	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	10.000 pelaku usaha	22.900 pelaku usaha	229
10.2	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	1000 orang	3.184 orang	318,4
V.	**Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal**	**Persentase Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang dilaksanakan**	**83%**	**122.15%**	**147.17**
11	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah	Jumlah perusahaan yang dilaksanakan pengendalian	474 Perusahaan	579 Perusahaan	122.15

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	(%)
	Kabupaten/Kota				
11.1	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	14 Kegiatan Usaha	74 Kegiatan Usaha	528,57
11.2	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	400 pelaku usaha	440 pelaku usaha	110
11.3	Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku DIlakukan Inspeksi Lapangan ; serta DIlakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	60 Kegiatan Usaha	65 Kegiatan Usaha	108,33
VI.	**Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal**	**Prosentase pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal**	**100 persen**	**100 persen**	**100**
12	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jenis Penyajian Data dan Informasi perizinan	4 Jenis (buku, website , sosialisasi perizinan, publikasi)	4 Jenis	100
12.1	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	3 Dokumen	3 Dokumen	100
	JUMLAH				
	= data sementara				

Secara sederhana kinerja realisasi anggaran program dan kegiatan ditampilkan dalam bentuk Tabel 2.1

Tabel: 2.1

Realisasi Program Dan Kegiatan

Tahun Anggaran 2024

NO	PROGRAM/KEGIATAN	TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	PERSEN (%)	ZONA PENYERAPAN ANGGARAN
I.	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**5.434.238.979,00**	**5.206.972.276,00**	**95,82**	
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	923.200,00	799.000,00	86,55	
1.1	*Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*	*314.500,00*	*290.000,00*	*92,21*	*Zona Hijau*

NO	PROGRAM/KEGIATAN	TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	PERSEN (%)	ZONA PENYERAPAN ANGGARAN
1.2	*Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD*	*304.600,00*	*262.000,00*	*86,01*	*Zona Hijau*
1.3	*Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	*304.100,00*	*247.000,00*	*81,22*	*Zona Kuning*
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.049.738.815,00	3.869.040.434,00	95,54	
2.1	*Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN*	3.467.982.900,*00*	*3.296.292.766,00*	*95,05*	*Zona Hijau*
2.2	*Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN*	581.605.915,*00*	*572.612.668,00*	*98,45*	*Zona Hijau*
2.3	*Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD*	150.000,*00*	*135.000,00*	*90,00*	*Zona Hijau*
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	287.600,00	287.600,00	100,00	
3.1	*Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD*	287.600,*00*	287.600,*00*	*100,00*	*Zona Hijau*
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.186.469.135,00	1.171.130.500,00	98,71	
4.1	*Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor*	1.497.600,*00*	1.497.600,*00*	*100,00*	*Zona Hijau*
4.2	*Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor*	1.146.986.135,*00*	*1.133.127.100,00*	*98,79*	*Zona Hijau*
4.3	*Penyediaan Peralatan Rumah Tangga*	9.315.100,*00*	*7.892.000,00*	*84,72*	*Zona Kuning*
4.4	*Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan*	7.051.800,*00*	*7.032.100,00*	*99,72*	*Zona Hijau*
4.5	*Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan*	10.260.000,*00*	*10.260.000,00*	*100,00*	*Zona Hijau*
4.6	*Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	11.358.500,*00*	*11.321.700,00*	*99,68*	*Zona Hijau*
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	169.820.229,00	139.114.147,00	81,92	
5.1	*Penyediaan Jasa Surat Menyurat*	*3.005.000,00*	*2.890.000,00*	*96,17*	*Zona Hijau*
5.2	*Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik*	*99.875.229,00*	*73.314.147,00*	*73,41*	*Zona Kuning*
5.3	*Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor*	*66.940.000,00*	*62.910.000,00*	*93,98*	*Zona Hijau*
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	27.000.000,00	26.600.595,00	98,52	
6.1	*Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas*	*27.000.000,00*	*26.600.595,00*	*98,52*	*Zona Hijau*

NO	PROGRAM/KEGIATAN	TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	PERSEN (%)	ZONA PENYERAPAN ANGGARAN
	Operasional atau Lapangan				
II.	**Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal**	**360.000.000,00**	**352.389.600,00**	**97,89**	
7	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	116.717.400,00	112.983.400,00	96,80	
7.1	*Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal*	*116.717.400,00*	*112.983.400,00*	*96,80*	*Zona Hijau*
8	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	243.282.600,00	239.406.200,00	98,41	
8.1	*Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota*	*69.282.600,00*	*67.689.700,00*	*97,70*	*Zona Hijau*
8.1	*Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota*	*174.000.000,00*	*171.716.500,00*	*98,69*	*Zona Hijau*
III.	**Program Promosi Penanaman Modal**	**431.391.600,00**	**410.552.026,00**	**95,17**	
9	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	431.391.600,00	410.552.026,00	95,17	
9.1	*Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota*	*431.391.600,00*	*410.552.026,00*	*95,17*	*Zona Hijau*
IV.	**Program Pelayanan Penanaman Modal**	**781.411.000,00**	**728.559.484,00**	**93,24**	
10	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	781.411.000,00	728.559.484,00	93,24	
10.1	*Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik*	*673.569.000,00*	*633.285.984,00*	*94,02*	*Zona Hijau*
10.2	*Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko*	*107.842.000,00*	*95.273.500,00*	*88,35*	*Zona Hijau*
V.	**Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal**	**669.598.300,00**	**563.963.683,00**	**84,22**	
11	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	669.598.300,00	563.963.683,00	84,22	
11.1	*Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya*	*91.752.000,00*	*77.415.000,00*	*84,37*	*Zona Kuning*
11.2	*Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha*	*336.429.000,00*	*310.992.875,00*	*92,44*	*Zona Hijau*

NO	PROGRAM/KEGIATAN	TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	PERSEN (%)	ZONA PENYERAPAN ANGGARAN
11.3	*Pengawasan Penanaman Modal*	*241.417.300,00*	*175.555.808,00*	*72,72*	*Zona Kuning*
VI.	**Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal**	**193.108.400,00**	**154.900.536,00**	**80,21**	
12	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	193.108.400,00	154.900.536,00	80,21	
12.1	*Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik*	*193.108.400,00*	*154.900.536,00*	*80,21*	*Zona Kuning*
	JUMLAH	**7.869.748.279,00**	**7.417.337.605,00**	**94,25**	***Zona Hijau***

Kinerja realisasi anggaran program dan kegiatan Tahun 2024 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kediri, secara umum dapat dikatakan mencapai tingkat efisiensi yang cukup bagus, artinya bahwa terdapat tingkat penggunaan anggaran di bawah 100 persen, namun menghasilkan keluaran (output) maupun outcome yang maksimal (lebih dari 100 persen).

2.1.2. Evaluasi Rencana Kerja 2024 atas Rencana Strategis

Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dan pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 dalam bentuk Tabel 2.2 berikut:

TABEL : 2.2
REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA SKPD DAN PENCAPAIAN RENSTRA SKPD SAMPAI DENGAN TAHUN 2024
KABUPATEN KEDIRI

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP) KAB. KEDIRI

KODE	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d. tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target Program/ kegiatan Renja SKPD Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d. Tahun 2025	
					Target Renja	Realisasi Renja	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL :									
2.18.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100.00%**	**100%**	**100.00%**	**100.00%**	**100.00%**	**100.00%**	**100.00%**	**100.00%**
2.18.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**62 dokumen**	**31 laporan**	**10 Laporan**	**10 laporan**	**100**	**10 dokumen**	**51 dokumen**	**82.26%**
2.18.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	14 dokumen	7 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	100	2 Dokumen	11 dokumen	78.57%
2.18.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 laporan	6 laporan	2 laporan	2 laporan	100	2 laporan	10 dokumen	83.33%
2.18.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	36 dokumen	18 dokumen	6 dokumen	6 dokumen	100	6 Laporan	30 dokumen	83.33%
2.18.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah**	**18 dokumen**	**9 dokumen**	**3 dokumen**	**3 dokumen**	**100**	**3 dokumen**	**15 dokumen**	**83.33%**
2.18.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	147 Orang/bulan	76 Orang/bulan	20 Orang/bulan	19 Orang/bulan	95	20 Orang/bulan	115 Orang/bulan	78.23%
2.18.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	72 Dokumen	36 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	100	12 Dokumen	60 Dokumen	83.33%
2.18.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	6 dokumen	3 laporan	1 laporan	1 laporan	100	1 laporan	5 dokumen	83.33%
2 18 01 2.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Jumlah laporan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah**	**12 laporan**	**6 laporan**	**2 laporan**	**2 laporan**	**100**	**2 laporan**	**10 laporan**	**83.33%**
2.18.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 laporan	6 laporan	2 laporan	2 laporan	100	2 laporan	10 laporan	83.33%
2.18.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**100%**	**0**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**110%**

KODE	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d. tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target Program/ kegiatan Renja SKPD Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d. Tahun 2025	
					Target Renja	Realisasi Renja	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2.18.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	18 orang	0	25 orang	25 orang	100	6 Orang	31 Orang	110.00%
2 18 01 2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100**	**100%**	**100%**	**100.00**
2.18.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6 Paket	3 Paket	1 Paket	1 Paket	100	1 paket (40 komponen)	5 Paket	83.33%
2.18.01.2.06.0002	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	24 Paket	3 Paket	15 Paket	15 Paket	100	5 Paket	23 Paket	95.83%
2.18.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	24 Paket	11 Paket	3 Paket	3 Paket	100	3 Paket	17 Paket	70.83%
2.18.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	24 Paket	11 Paket	3 Paket	3 Paket	100	2 Paket	16 Paket	66.67%
2.18.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	24 Dokumen	12 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	100	12 Dokumen	28 Dokumen	110.00%
2.18.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	72 Laporan	36 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100	12 Laporan	60 Laporan	83.33%
2 18 01 2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintaah Daerah yang Disediakan**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100**	**100%**	**100**	**100**
2.18.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	72 Laporan	36 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100	12 Laporan	60 Laporan	83.33%
2.18.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	72 Laporan	36 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100	12 Laporan	60 Laporan	83.33%
2.18.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	72 Laporan	36 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100	12 Laporan	60 Laporan	83.33%
2 18 01 2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Barang Milik Daerah (BMD) Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Dipelihara**	**32 unit**	**17 unit**	**5 unit**	**5 unit**	**100**	**5 unit**	**27 unit**	**84.38%**

KODE	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d. tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target Program/ kegiatan Renja SKPD Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d. Tahun 2025	
					Target Renja	Realisasi Renja	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2.18.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	30 unit	15 unit	5 unit	5 unit	100	5 unit	25 unit	83.33%
2.18.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 gedung	2 gedung	0	0	0	0	2 gedung	100.00%
2 18 02	**PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL**	**Persentase Pelaku usaha yang diberikan insentif/fasilitas di bidang penanaman modal**	**100%**	**25%**	**25%**	**25%**	**100**	**25%**	**75%**	**75**
2 18 02 2.01	**Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah dokumen yang disusun atas penetapan pemberian fasilitas/insentif di bidang penanaman modal**	**9 dokumen**	**2 dokumen**	**2 dokumen**	**2 dokumen**	**100**	**1 dokumen**	**8 dokumen**	**100**
2.18.02.2.01.0001	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah dokumen yang disusun atas kegiatan penetapan kebijakan mengenai pemberian fasilatas/insentif dan kemudahan penanaman modal	3 dokumen	4 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100	1 dokumen	6 dokumen	200.00%
2 18 02 2.01 02	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah dokumen yang disusun atas evaluasi pelaksanaan pemberian fasilitas/insentif dan kemudahan penanaman modal	6 dokumen	4 dokumen	0	0	0	0	4 dokumen	66.67%
2.18.02.2.01.0003	Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah	0	0	0	0	0	1 Dokumen	1 Dokumen	0
2 18 02 2.02	**Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota**	**Jumlah Dokumen RUPM, Peta potensi dan peluang usaha yang disusun**	**7 dokumen**	**4 dokumen**	**2 dokumen**	**2 dokumen**	**100**	**2 dokumen**	**8 dokumen**	**114.29%**
2.18.02.2.02.0001	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	2 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100	1 dokumen	3 dokumen	150.00%
2.18.02.2.02.0004	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	5 dokumen	3 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100	1 dokumen	5 dokumen	100.00%
2 18 03	**PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL**	**Prosentase pelaksanaan strategi dan kegiatan promosi yang dilaksanakan**	**100%**	**100,00**	**100%**	**100%**	**100**	**100%**	**100%**	**100**
2 18 03 2.01	**Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah media promosi, market inteligent, publikasi dan kegiatan promosi yang dilakukan**	**9 Dokumen**	**3 Dokumen**	**2 dokumen**	**2 dokumen**	**100**	**3 dokumen**	**8 dokumen**	**88.89%**

KODE	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d. tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target Program/ kegiatan Renja SKPD Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d. Tahun 2025	
					Target Renja	Realisasi Renja	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2.18.03.2.01.0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan promosi (pameran investasi, matchmaking dan bussiness gathering) yang dilaksanakan	6 Dokumen	3 Dokumen	2 dokumen	2 dokumen	100	2 Dokumen	7 Dokumen	116.67%
2.18.03.2.01.0003	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota	3 Dokumen	0	0	0	0	1 Dokumen	1 Dokumen	33.33%
2 18 04	**PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL**	**Prosentase pelayanan perizinan dan non perizinan secara terpadu satu pintu**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100.00**	**100%**	**100%**	**100**
2 18 04 2.01	**Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota**	**Prosentase ijin dan pemenuhan komitmen terbit dan selesai**	**78%**	**100%**	**78%**	**100%**	**129.87**	**79%**	**92.67%**	**118.81**
2 18 04 2.01 01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jenis izin yang dilayani melalui sistem pelayanan perizinan secara elektronik	130 jenis	11 jenis					61 izin	46.92
2 18 04 2.01 02	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Jenis Pemenuhan Komitmen Perizinan dan non Perizinan Penanaman Modal	130 jenis	11 jenis					34 jenis	26.15
2 18 04 2.01 03	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Jenis dokumen terkait layanan perizinan dan pengaduan (Standar Pelayanan dan SKM) yang diterbitkan	6 jenis	1 jenis (1 dokumen)					4 jenis	66.67
2.18.04.2.01.0006	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik			10.000 pelaku usaha	22.900 pelaku usaha	229	10000 Pelaku Usaha	32.900 pelaku usaha	
2.18.04.2.01.0007	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan non Perizinan	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik			1000 orang	3.184 orang	318.4	1000 Pelaku Usaha	4.184 orang	
2 18 05	**PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL**	**Persentase Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang dilaksanakan**	**83%**	**101.76%**	**83%**	**101.76%**	**122.60**	**84%**	**330.59%**	**398.30**

KODE	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d. tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target Program/ kegiatan Renja SKPD Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d. Tahun 2025	
					Target Renja	Realisasi Renja	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2 18 05 2.01	**Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah perusahaan yang dilaksanakan pengendalian**	**838 perusahaan**	**463 Perusahaan**	**474 Perusahaan**	**579 Perusahaan**	**122.15**	**474 Perusahaan**	**2068 perusahaan**	**246.78**
2 18 05 2.01 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah perusahaan yang dilakukan pemantauan	305 perusahaan	30 perusahaan					204 perusahaan	66.8852459
2 18 05 2.01 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah perusahaan yang dibina	270 perusahaan	400 perusahaan					1220 perusahaan	451.85
2 18 05 2.01 03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Perusahaan yang dilakukan pengawasan	150 perusahaan	33 perusahaan					170 perusahaan	113.33
2.18.05.2.01.0004	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya			14 Kegiatan Usaha.	74 Kegiatan Usaha.	528.57	14 Kegiatan Usaha	88 Kegiatan Usaha	
2.18.05.2.01.0005	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko			400 pelaku usaha	440 pelaku usaha	110.00	400 Pelaku Usaha	840 pelaku usaha	
2.18.05.2.01.0006	Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dllakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dllakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha			60 Kegiatan Usaha	65 Kegiatan Usaha	108.33	60 Kegiatan Usaha	125 Kegiatan Usaha	
2 18 06	**PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL**	**Persentase pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal**	**100%**	**100 persen**	**100 persen**	**100 persen**	**100**	**100 persen**	**200%**	**200**
2 18 06 2.01	**Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Jenis Penyajian Data dan Informasi perizinan**	**15 jenis**	**4 jenis**	**4 Jenis (buku, website , sosialisasi perizinan, publikasi)**	**4 jenis**	**100**	**3 jenis**	**15 jenis**	**100.00**

KODE	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d. tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target Program/ kegiatan Renja SKPD Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d. Tahun 2025	
					Target Renja	Realisasi Renja	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2 18 06 2.01 01	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	1. Jumlah Buku data realisasi investasi dan perizinan 2. Jumlah website penyajian informasi penanaman modal dan perizinan 3. Jumlah Peserta Sosialisasi Perizinan	18 Jenis	4 jenis					12 jenis	80.00
2.18.06.2.01.0002	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	18 Dokumen	12 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	100	3 Dokumen	18 Dokumen	100.00

Dari tabel 2.2 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024, Capaian persentase pada perkiraan realisasi capaian target Renstra Tahun 2021 s.d. Tahun 2025 idealnya pada rentang 78,00% s.d. 83,33%. Tergantung pada konsistensi pelaksanaan kegiatan.

Beberapa sub kegiatan, tidak dapat disajikan persentasenya dikarenakan hasil dari pemutakhiran nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 tahun 2023 diberlakukan mulai dari penyusunan dokumen perencanaan pembangunan tahun 2024. Dimana sub kegiatan baru ini, tidak tercantum pada Renstra Tahun 2021-2026 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kediri sehingga target kinerja capaian program (Renstra SKPD) s.d. Tahun 2026 tidak diisi.

Penjelasan capaian kinerja atas pencapaian Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dijelaskan per-Program sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

   Pada program ini terdiri dari 7 (tujuh) kegiatan 19 (sembilan belas) sub kegiatan, dari 19 (sembilan belas) sub kegiatan, capaian yang di bawah rentang 78,00% s.d. 83,33% sebanyak 2 (dua) sub kegiatan. Hal ini dikarenakan adanya perubahan indikator berdasarkan pemutakhiran nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 tahun 2023 mempengaruhi jumlah paket belanja yang dientry (lebih sedikit).

   Capaian yang di atas rentang 78,00% s.d. 83,33% sebanyak 4 (empat) sub kegiatan, hal ini dikarenakan:

   a. Adanya penambahan belanja dikarenakan pembangunan Mal Pelayanan Publik (MPP) yang belum diperkirakan pada waktu penyusunan Renstra Tahun 2021-2026;
   b. Target Kinerja sub kegiatan pada Renstra selesai lebih awal.

2. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal

   Pada program ini terdiri dari 2 (dua) kegiatan, 1 (satu) sub kegiatan nomenklatur lama yang terhapus pada Tahun 2024 dan 4 (empat) sub kegiatan nomenklatur baru, dari sub kegiatan tersebut, capaian yang di bawah rentang 78,00% s.d. 83,33% sebanyak 2 (dua) sub kegiatan. Hal ini dikarenakan:

   a. Adanya sub kegiatan nomenklatur lama yang terhapus pada Tahun 2024;
   b. Adanya sub kegiatan nomenklatur baru yang belum masuk Renstra Tahun 2021-2026.

3. Program Promosi Penanaman Modal

   Pada program ini terdiri dari 1 (satu) kegiatan, 2 (dua) sub kegiatan nomenklatur baru yang narasinya sama dengan nomenklatur lama, dari sub kegiatan tersebut, capaian yang di bawah rentang 78,00% s.d. 83,33% sebanyak 1 (satu) sub kegiatan. Hal ini dikarenakan:

   a. Adanya keterlambatan realisasi kegiatan karena target pasar belum jelas. *Investment Project Ready to Offer (I-PRO)* baru disusun pada tahun 2024.

4. Program Pelayanan Penanaman Modal

   Pada program ini terdiri dari 1 (satu) kegiatan, 3 (tiga) sub kegiatan nomenklatur lama yang terhapus pada Tahun 2024 dan 2 (dua) sub kegiatan nomenklatur baru, dari sub kegiatan tersebut, capaian yang di bawah rentang 78,00% s.d. 83,33% sebanyak 5 (lima) sub kegiatan. Hal ini dikarenakan:

   a. Adanya sub kegiatan nomenklatur lama yang terhapus pada Tahun 2024;
   b. Adanya sub kegiatan nomenklatur baru yang belum masuk Renstra Tahun 2021-2026.

5. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

   Pada program ini terdiri dari 1 (satu) kegiatan, 3 (tiga) sub kegiatan nomenklatur lama yang terhapus pada Tahun 2024 dan 3 (tiga) sub kegiatan nomenklatur baru, dari sub kegiatan tersebut, capaian yang di bawah rentang 78,00% s.d. 83,33% sebanyak 4 (empat) sub kegiatan. Hal ini dikarenakan:

   a. Adanya sub kegiatan nomenklatur lama yang terhapus pada Tahun 2024;
   b. Adanya sub kegiatan nomenklatur baru yang belum masuk Renstra Tahun 2021-2026.

6. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal

   Pada program ini terdiri dari 1 (satu) kegiatan, 1 (satu) sub kegiatan nomenklatur baru yang narasinya mirip dengan nomenklatur lama, dari sub kegiatan tersebut, capaian kinerja sesuai rentang 78,00% s.d. 83,33% atau kegiatan sesuai rencana.

Meskipun ada pemutakhiran nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 tahun 2023, hasil rencana kerja tahunan berjalan sesuai Rencana Strategis.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Analisis Kinerja Pelayanan ini dilihat berdasarkan capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 yang disajikan pada tabel 2.3 berikut.

TABEL 2.3
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN DPMPTSP
KABUPATEN KEDIRI

NO.	Indikator Kinerja	SPM/ Standard Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Prosentase pertumbuhan investasi di daerah	-	Ada	6,00%	7,00%	8,00%	9,00%	26,16 %	29,99%	8,00%	9,00%	
2	Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Terhadap Pelayanan Perizinan	-	-	79,65	79,70	79,75	79,75	84,25	85,05	85,05	79,75	
3	Nilai realisasi Investasi (Milyar Rupiah)	-	Ada	736.06	1,026.67	3,200.00	3,200.00	3,204.08	4,636.22	3,200.00	927.14	Penyebab Keberhasilan realisasi investasi pada tahun 2024 diantaranya dikarenakan adanya PSN Bandara Kediri
4	Jumlah kemitraan usaha yang bisa didorong	-		1 MoU	1 MoU	3 MoU	1 MoU	1 MoU	12 Mou	3 MoU	1 MoU	

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Tingkat kinerja pelayanan penanaman modal disajikan pada tabel berikut:

Indikator	Tahun		
	2022	2023	2024
Nilai Realisasi Investasi di Daerah (Juta Rupiah)	694.396,06	736.059,83	3.200.000
Realisasi	**3.180.910,11**	**3.204.083,37**	**4.636.215,44**
% Peningkatan		**0,73**	**44,70**
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Pelayan Perizinan	79,60	79,65	84,70
Realisasi	**83,07**	**84,25**	**85,05**
% Peningkatan		**1,42**	**0,95**
Jumlah kemitraan usaha yang bisa didorong	1 MoU	1 MoU	1 MoU
Realisasi	**1 MoU**	**1 MoU**	**12 MoU/ Pernyataan Minat**
% Peningkatan		**0**	**1100**

Secara umum ketiga indikator kinerja pelayanan penanaman modal mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Nilai realisasi investasi di daerah mengalami peningkatan dikarenakan adanya kontribusi Proyek Strategis Nasional (PSN) Bandara Kediri.

Permasalahan dan hambatan yang dihadapi:

1. Terkait dengan peningkatan kualitas pelayanan dalam menciptakan kondisi kenyamanan pelayanan kepada masyarakat dibidang penanaman modal dan pelayanan perizinan perlu didukung dengan sarana prasarana yang memadai ;
2. Sumber daya manusia yang terbatas sehingga adanya ketidakseimbangan antara pegawai dan beban kerja ;
3. Wawasan pengetahuan terkait dengan peraturan – peraturan yang relevan dengan tugas pokok dan fungsi masih terbatas.

Beberapa isu penting yang berkaitan dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Kediri antara lain :

1. Transparansi dan akuntabilitas, transparansi dalam proses perizinan maupun pengambilan keputusan sangat penting. DPMPTSP harus dapat memberikan informasi yang jelas dan mudah diakses kepada para pengusaha dan investor mengenai persyaratan, tahapan, biaya, dan waktu yang diperlukan untuk mendapatkan izin;
2. Adanya upaya untuk memberikan kemudahan investasi bagi investor untuk melakukan investasi di daerah;

3. Peningkatan Sumber Daya Manusia melalui pelatihan maupun bimbingan teknis mendukung peningkatan kualitas pelayanan;
4. Penggunaan teknologi informasi untuk mempermudah dan mempercepat proses perizinan;
5. Mendorong pemberdayaan ekonomi lokal dengan memberikan dukungan kepada pelaku usaha lokal untuk memperoleh izin dan berinvestasi;
6. Ketersediaan sarana prasarana pendukung penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu;
7. Investasi yang dilakukan harus memperhatikan isu lingkungan dan keberlanjutan;
8. Perlunya dukungan terhadap program pengentasan kemiskinan melalui kemudahan perizinan.

Rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan tahun berikutnya :

1. Menyelenggarakan proses pelayanan perizinan keliling online;
2. Menyediakan sarana prasarana yang memadai secara bertahap ;
3. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui Bimbingan teknis pelayanan publik agar masing-masing pegawai mempunyai kompetensi sesuai bidangnya ;
4. Melakukan studi banding ke daerah lain terkait dengan pelayanan perizinan maupun penetapan peraturan perundangan yang relevan dengan kondisi daerah ;
5. Meningkatkan promosi terhadap potensi daerah baik dalam daerah maupun luar daerah;

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Dalam Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kediri, yang didasarkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kediri 2021 – 2026 sebagai berikut :

Visi :

“**Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Kediri yang Maju, Berkarakter Nasionalis-Religius, serta Sejahtera Berdasarkan Ekonomi Kerakyatan yang Didukung Birokrasi yang Melayani.”**

Misi :

Untuk mewujudkan Visi tersebut, ditetapkan Misi pembangunan Kabupaten Kediri tahun 2021 – 2026 sebagai berikut :

1. Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkarakter nasionalis-religius;
2. Reformasi birokrasi dan pelayanan publik;
3. Pengembangan ekonomi kerakyatan dan peningkatan investasi daerah
4. Revitalisasi pertanian untuk ketahanan dan swasembada pangan
5. Peningkatan infrastruktur dan konekfitas antar wilayah
6. Optimalisasi kepariwisataan berbasis kearifan local
7. Optimalisasi tata kelola lingkungan hidup, Sumber Daya Alam (SDA), dan mitigasi bencana
8. Pengembangan seni, budaya, olahraga, dan kretifitas pemuda
9. Perwujudan kemandirian desa untuk kesejahteraan masyarakat

Terkait dengan visi dan misi RPJMD Kabupaten Kediri 2021-2026, tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sesuai dengan Misi 3 (tiga) yaitu: Pengembangan ekonomi kerakyatan dan peningkatan investasi daerah.

Selanjutnya Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) dijabarkan ke dalam Rencana Kerja DPMPTSP Tahun 2026. Di dalam Rencana Kerja DPMPTSP Tahun 2026 pagu indikatif anggaran sebesar 8.777.570.141,00 dengan rincian alokasi:

a. Belanja Gaji, Tunjangan, dan Tambahan Perbaikan Penghasilan (TPP) atau Belanja Tidak Langsung sebesar Rp 4.545.225.916,00 dan
b. Belanja Operasional sebesar Rp 4.232.344.225,00

Secara matriks review terhadap rencana kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) tahun 2026 disajikan dalam tabel 2.4 sebagai berikut:

Tabel : 24

REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA TAHUN 2026

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP)

4,271,154,800.00 7535262179

NO	RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA				HASIL ANALISA KEBUTUHAN				CATATAN
	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL			**8,777,570,141**				**8,777,570,141**	
I	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100%**	**7,109,891,094**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100%**	**7,109,891,094**	
1	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**10 dokumen**	**441,800**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**10 dokumen**	**441,800**	
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	154,200	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	154,200	
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 laporan	143,800	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 laporan	143,800	
3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 Laporan	143,800	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 Laporan	143,800	
2	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah**	**3 dokumen**	**5,430,342,969**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah**	**3 dokumen**	**5,430,342,969**	
4	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	30 Orang/bulan	4,545,225,916	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	30 Orang/bulan	4,545,225,916	
5	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	885,043,053	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	885,043,053	
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	74,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	74,000	
3	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Jumlah laporan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah**	**2 laporan**	**143,800**	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Jumlah laporan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah**	**2 laporan**	**143,800**	
7	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 laporan	143,800	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 laporan	143,800	
4	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**100%**	**133,200,000**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**100%**	**133,200,000**	
8	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	32 Orang	133,200,000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	32 Orang	133,200,000	
5	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100%**	**1,031,028,945**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100%**	**1,031,028,945**	

NO	RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA				HASIL ANALISA KEBUTUHAN				CATATAN
	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA	
9	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	1,497,600	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	1,497,600	
10	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket	957,913,045	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket	957,913,045	
11	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 Paket	13,441,000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 Paket	13,441,000	
12	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	9,311,900	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	9,311,900	
13	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	8,902,400	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	8,902,400	
14	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	39,963,000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	39,963,000	
6	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintaah Daerah yang Disediakan**	**100%**	**481,733,580**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintaah Daerah yang Disediakan**	**100%**	**481,733,580**	
15	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	5,750,000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	5,750,000	
16	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	354,043,580	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	354,043,580	
17	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	121,940,000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	121,940,000	
7	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Barang Milik Daerah (BMD) Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Dipelihara**	**4 unit**	**33,000,000**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Barang Milik Daerah (BMD) Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Dipelihara**	**4 unit**	**33,000,000**	
18	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 unit	33,000,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 unit	33,000,000	
II	**PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL**	**Persentase Pelaku usaha yang diberikan insentif/fasilitas di bidang penanaman modal**	**25%**	**203,434,000**	**PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL**	**Persentase Pelaku usaha yang diberikan insentif/fasilitas di bidang penanaman modal**	**25%**	**203,434,000**	
8	**Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif di Bidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota**	**Jumlah dokumen yang disusun atas penetapan pemberian fasilitas/insentif di bidang penanaman modal**	**2 dokumen**	**69,082,800**	**Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif di Bidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota**	**Jumlah dokumen yang disusun atas penetapan pemberian fasilitas/insentif di bidang penanaman modal**	**2 dokumen**	**69,082,800**	
19	Penetapan kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	1 dokumen	46,017,800	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	1 dokumen	46,017,800	
20	Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah	1 Dokumen	23,065,000	Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah	1 Dokumen	23,065,000	

NO	RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA				HASIL ANALISA KEBUTUHAN				CATATAN
	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA	
9	**Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota**	**Jumlah Dokumen RUPM, Peta potensi dan peluang usaha yang disusun**	**2 dokumen**	**134,351,200**	**Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota**	**Jumlah Dokumen RUPM, Peta potensi dan peluang usaha yang disusun**	**2 dokumen**	**134,351,200**	
21	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	1 dokumen	70,032,700	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	1 dokumen	70,032,700	
22	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	1 dokumen	64,318,500	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	1 dokumen	64,318,500	
III	**PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL**	**Prosentase pelaksanaan strategi dan kegiatan promosi yang dilaksanakan**	**100%**	**349,987,300**	**PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL**	**Prosentase pelaksanaan strategi dan kegiatan promosi yang dilaksanakan**	**100%**	**349,987,300**	
10	**Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota**	**Jumlah media promosi, market inteligent, publikasi dan kegiatan promosi yang dilakukan**	**3 Dokumen**	**349,987,300**	**Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota**	**Jumlah media promosi, market inteligent, publikasi dan kegiatan promosi yang dilakukan**	**3 Dokumen**	**349,987,300**	
23	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten Kediri	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	2 Dokumen	279,394,300	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten Kediri	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	2 Dokumen	279,394,300	
24	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota	1 Dokumen	70,593,000	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota	1 Dokumen	70,593,000	
IV	**PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL**	**Prosentase pelayanan perizinan dan non perizinan secara terpadu satu pintu**	**100%**	**649,278,507**	**PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL**	**Prosentase pelayanan perizinan dan non perizinan secara terpadu satu pintu**	**100%**	**649,278,507**	
11	**Pelayanan Perizinan dan non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten / Kota**	**Prosentase ijin dan pemenuhan komitmen terbit dan selesai**	**80%**	**649,278,507**	**Pelayanan Perizinan dan non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten / Kota**	**Prosentase ijin dan pemenuhan komitmen terbit dan selesai**	**80%**	**649,278,507**	
25	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	10000 Pelaku Usaha	561,364,507	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	10000 Pelaku Usaha	561,364,507	
26	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	100 Pelaku Usaha	87,914,000	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan non Perizinan	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	100 Pelaku Usaha	87,914,000	
V	**PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL**	**Persentase Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang dilaksanakan**	**85%**	**275,886,200**	**PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL**	**Persentase Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang dilaksanakan**	**85%**	**275,886,200**	
12	**Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota**	**Jumlah perusahaan yang dilaksanakan pengendalian**	**380 perusahaan**	**275,886,200**	**Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota**	**Jumlah perusahaan yang dilaksanakan pengendalian**	**380 perusahaan**	**275,886,200**	

NO	RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA				HASIL ANALISA KEBUTUHAN				CATATAN
	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA	
27	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	5 Kegiatan Usaha	23,548,300	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	5 Kegiatan Usaha	23,548,300	
28	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	300 Pelaku Usaha	161,127,600	-	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	300 Pelaku Usaha	161,127,600	
29	Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku DIlakukan Inspeksi Lapangan ; serta DIlakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	75 Kegiatan Usaha	91,210,300	Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku DIlakukan Inspeksi Lapangan ; serta DIlakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	75 Kegiatan Usaha	91,210,300	
VI	**PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL**	**Prosentase pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal**	**100 persen**	**189,093,040**	**PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL**	**Prosentase pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal**	**100 persen**	**189,093,040**	
13	**Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten / Kota**	**Jenis Penyajian Data dan Informasi perizinan**	**3 jenis**	**189,093,040**	**Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten / Kota**	**Jenis Penyajian Data dan Informasi perizinan**	**3 jenis**	**189,093,040**	
30	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	3 Dokumen	189,093,040	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	3 Dokumen	189,093,040	

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

Penyusunan rencana kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Tahun 2026, selain melibatkan instansi vertikal dan horisontal terkait, juga melibatkan unsur pemangku kepentingan bidang penanaman modal dan pelayanan perijinan yang lain, dengan harapan rencana kerja yang akan disusun dan dilaksanakan pada Tahun 2026 bisa menjawab tuntutan pembangunan dan kebutuhan yang berkembang di masyarakat. Penggalian aspirasi akan kebutuhan dan pembangunan dilaksanakan melalui mekanisme Forum Konsultasi Publik Penyusunan Rancangan Awal (Ranwal) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kediri Tahun 2026, yang melibatkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan dihadiri pula oleh oleh organisasi pemangku kepentingan, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan dari akademisi/perguruan tinggi.

Dalam Forum Konsultasi Publik Penyusunan Rancangan Awal (Ranwal) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kediri Tahun 2026 ini digali semua saran masukan, usulan yang diharapkan bisa menyempurnakan rancangan rencana pembangunan daerah pada Tahun 2026. Pada forum ini, secara khusus tidak ada saran masukan dan usulan yang ditujukan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). Namun demikian ada beberapa pandangan umum DPRD Kabupaten Kediri atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kediri Tahun 2021-2026 yang perlu mendapat perhatian Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). Perhatian ini menjadi penting karena Dokumen (RPJMD) juga menjadi dasar hukum penyusunan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah, termasuk Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). Pandangan umum dimaksud adalah:

1. Penguatan sumber daya manusia baik SDM perangkat daerah dan SDM masyarakat perlu mendapat perhatian agar visi Kabupaten Kediri, yakni birokrasi yang melayani dapat terwujud terutama akses pelayanan kesehatan masyarakat, administrasi kependudukan, dan perijinan usaha;
2. Optimalisasi pertumbuhan investor sektor perdagangan dan jasa skala nasional dan internasional guna mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.

Pandangan umum DPRD Kabupaten Kediri atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kediri Tahun 2021-2026 menjadi salah satu konsen Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), dan dituangkan ke dalam program prioritas.

Tabel : 2.5

USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PARA PEMANGKU KEPENTINGAN TAHUN 2026

KABUPATEN KEDIRI

NAMA PERANGKAT DAERAH : DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP)

NO	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN/ VOLUME	CATATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

N I H I L

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Untuk mewujudkan visi dan misi, beserta tujuan dan sasaran yang telah dirumuskan, diperlukan penetapan mengenai upaya mencapai tujuan dan sasaran misi tersebut dalam bentuk strategi dan arah kebijakan. Arah kebijakan Jangka Menengah Nasional, yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menangah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029 mempunya visi “Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”. Yang selanjutnya visi tersebut dituangkan ke dalam 8 (Delapan) misi, yang dikenal sebagai Asta Cita, yaitu:

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM);
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;
3. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur;
4. Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas;
5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan;
7. Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba; dan
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat adil dan makmur.

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu berperan dalam mendukung pencapaian Misi (Prioritas Nasional) ke-5 pada RPJMN yaitu “Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri”, pada Sasaran Prioritas Nasional (PN) “Integrasi Ekonomi

Domestik dan Global", dengan indikator PN "Pembentukan Modal Tetap Bruto (Persen PDB)". Dalam rangka mendukung pencapaian sasaran tersebut, dibutuhkan investasi yang lebih tinggi dan berkualitas.

Selanjutnya Pada Rancangan Awal RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2029, Visi Pembangunan RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2029, sebagai berikut:

"Bersama Jawa Timur Maju Yang Adil, Makmur, Unggul, dan Berkelanjutan Menuju Indonesia Emas 2045"

Sedangkan Misi Pembangunan RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2030 yang terkait Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Kediri pada Nawa Bhakti Satya dan Prioritas Pembangunan Provinsi (PP) 2:

"Jatim Kerja, memperluas lapangan kerja yang berkualitas melalui peningkatan kewirausahaan baru (startup), pengembangan ekonomi kreatif, iklim investasi, stabilitas ekonomi serta pengendalian harga kebutuhan pokok, dan penguasaan keterampilan abad 21 yang berdaya saing".

Dalam Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kediri periode 2021-2026, disebutkan Visi Kabupaten Kediri **"Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Kediri yang Maju, Berkarakter Nasionalis-Religius, serta Sejahtera Berdasarkan Ekonomi Kerakyatan yang Didukung Birokrasi yang Melayani."**, dengan rincian misi sebagai berikut:

1. Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkarakter nasionalis-religius;
2. Reformasi birokrasi dan pelayanan publik;
3. Pengembangan ekonomi kerakyatan dan peningkatan investasi daerah;
4. Revitalisasi pertanian untuk ketahanan dan swasembada pangan
5. Peningkatan infrastruktur dan konekfitas antar wilayah;
6. Optimalisasi kepariwisataan berbasis kearifan lokal;
7. Optimalisasi tata kelola lingkungan hidup, Sumber Daya Alam (SDA), dan mitigasi bencana;
8. Pengembangan seni, budaya, olahraga, dan kretifitas pemuda; dan
9. Perwujudan kemandirian desa untuk kesejahteraan masyarakat

Adapun Misi Pembangunan Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2021-2026 yang didukung oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) adalah Pembangunan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Pertanian, Usaha Mikro Kecil dan Menengah, Koperasi, dan Pariwisata, dengan rincian program prioritas yang ke-sepuluh, yaitu Peningkatan Investasi dan Daya

Saing Produk Unggulan Berbasis Sumber Daya Lokal dan Penggunaan Teknologi Informasi dan pemanfaatan *Artificial Intelligence (AI).*

Berdasarkan hal tersebut, maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) merumuskan strategi dalam upaya peningkatan investasi dan daya saing produk unggulan daerah untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, yaitu dengan berupaya mewujudkan Kabupaten Kediri sebagai daerah tujuan investasi yang didukung oleh pelayanan perizinan yang mudah, cepat, tepat, akurat, transparan dan akuntabel. Guna mendukung upaya tersebut, Strategi yang diambil DPMPTSP yaitu:

1. Melaksanakan pelayanan perizinan secara online dengan sistem yang terintegrasi
2. Meningkatkan promosi potensi unggulan dan potensi investasi secara selektif dan terpadu dengan pihak pemerintah dan swasta
3. Meningkatkan fasilitasi kerjasama di bidang penanaman modal antar Pemerintah Kabupaten/Pem Kota, Pemerintah Propinsi dan lembaga/ instansi terkait melalui study banding dan temu usaha.
4. Meningkatkan pelayanan perizinan dan non perizinan di bidang penanaman modal sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP).
5. Mengikutsertakan karyawan dalam bimbingan teknis penanaman modal yang diselenggarakan oleh instansi terkait
6. Melaksanakan pemantauan, pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penanaman modal melalui Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM).

3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Dalam Pasal 4 menyebutkan bahwa setiap Pemerintah Daerah menyusun rencana pembangunan Daerah sesuai dengan kewenangannya dan disebutkan dalam Pasal 11 ayat (1) Perencanaan pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 9 dilakukan terhadap rencana pembangunan Daerah dan rencana Perangkat Daerah. Pasal 11 ayat (3) Rencana Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:

a. Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah; dan

b. Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah.

Mengacu dan memperhatikan peraturan dimaksud, maka Renstra perangkat daerah menjadi salah satu bahan rujukan dan evaluasi dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah dan penyelenggaraan pelaksanaan kegiatan yang tertuang dalam renja tersebut. Dalam Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Tahun 2021-2026 disebutkan bahwa tujuan yang ingin dicapai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) adalah **"Meningkatkan Investasi di Daerah"**. Suatu investasi dikatakan meningkat apabila nilai investasi saat ini atau tahun ini lebih baik dari tahun sebelumnya. Angka peningkatan ini dinyatakan dalam bentuk prosentase (%), yaitu dengan membandingkan nilai investasi pada tahun ini dengan tahun sebelumnya. Oleh karena itu indikator tujuan yang ditetapkan adalah **"Prosentase pertumbuhan investasi di daerah"**

Sedangkan sasaran yang ingin diwujudkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) seperti yang tertuang dalam Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Tahun 2021-2026, adalah **"Meningkatnya Kinerja Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan di Daerah"**. Adapun indikator yang ditetapkan untuk mengukur ketercapaian sasaran ini ada 3 (tiga) indikator, yaitu:

1. Nilai realisasi investasi di daerah, yaitu suatu kondisi di mana besaran nilai investasi telah dicapai pada tahun bersangkutan. Nilai investasi ini dinyatakan dalam bentuk satuan Rupiah (Rp).
2. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayan perizinan, yaitu suatu kondisi yang menggambarkan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perizinan. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) didapat dari serangkaian kegiatan untuk menggali data dan informasi pendukung, yang biasa kita namakan kegiatan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM). Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dinyatakan dalam bentuk skor nilai, dengan skor tertinggi 100,00. Kriteria Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kediri Nomor 188.45/345/418.08/2017, tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kabupaten Kediri dan Perangkat daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri, dengan kriteria:
   a. Sangat Baik, apabila perolehan skor nilai: 81,26 – 100,00
   b. Baik, apabila perolehan skor nilai: 62,51 – 81,25
   c. Kurang Baik, apabila perolehan skor nilai: 43,76 – 62,50
   d. Tidak Baik, apabila perolehan skor nilai: 25,00 – 43,75

3. Jumlah kemitraan usaha yang bisa didorong, yang dinyatakan dalam satuan jumlah dokumen MoU yang dihasilkan.

Secara naratif dan rinci sasaran yang ingin dicapai dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Kediri Tahun 2026 ini adalah:

1) Meningkatnya nilai investasi di daerah dan minat investor dari berbagai daerah untuk berinvestasi di Kabupaten Kediri;
2) Terakomodirnya program dan kegiatan yang menjadi kebutuhan masyarakat dan pelaku usaha di daerah;
3) Kepuasan masyarakat dengan memberikan kemudahan dalam proses pelayanan bidang penanaman modal maupun pelayanan perizinan dan Non Perijinan;
4) Tersinkronisasinya program dan kegiatan yang menjadi kebijakan nasional di bidang penanaman modal dengan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh DPMPTSP.

3.3. Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan yang dituangkan dalam Dokumen Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Tahun 2026 adalah sebagai upaya yang terencana untuk pencapaian visi dan misi kepala daerah, yang secara operasional diterjemahkan dalam pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah pada tahun 2026.

Penentuan skala prioritas atas program dan kegiatan ditentukan oleh faktor-faktor yang melingkupi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), yang sekaligus menjadi isu strategis pada tahun 2026, meliputi:

1. Keterbatasan informasi calon lahan atau calon kawasan industri dan kawasan berusaha;
2. Keterbatasan bahan promosi investasi, yang berakibat pada terhambatnya peningkatan promosi dan kerjasama penanaman modal;
3. Optimalisasi pembinaan, pengawasan dan pengendalian penanaman modal;
4. Terobosan pelayan perizinan berusaha, serta menciptakan inovasi baru dalam pelayanan perizinan dan non perizinan;
5. Pemanfaatan sistem informasi, sarana dan prasarana terkait penanaman modal dan pelayanan perizinan kepada masyarakat, serta menciptakan aplikasi pengelolaan sistem informasi pelayanan terpadu yang terintegrasi secara internal dengan OPD Teknis terkait;
6. Adanya Pelaku usaha yang “naik kelas”, misal dari jenis usaha mikro/kecil berkembang menjadi usaha menengah/besar, sehingga lahan tidak sesuai lagi dengan peruntukannya;

7. Belum ter-*conect*-nya Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) ke dalam system perizinan;
8. Penyederhanaan persyaratan dan alur perizinan dan non perizinan, sehingga memudahkan proses dan prosedur perijinan dengan tetap memegang norma dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Aparatur yang memiliki kompetensi, kualitas dan profesionalitas di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan dan non perizinan

Adapun Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2027, dalam bentuk matriks disajikan pada tabel 3.1 sebagai berikut :

Tabel 3.1

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027
KABUPATEN KEDIRI

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL			**8,777,570,141**				**8,482,842,747**
I	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100%**	**7,109,891,094**	**DAU**		**100%**	**7,062,494,140**
1	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**10 dokumen**	**441,800**	**DAU**		**10 dokumen**	**967,800**
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	154,200	DAU		2 Dokumen	330,500
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 laporan	143,800	DAU		2 laporan	319,500
3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 Laporan	143,800	DAU		6 Laporan	317,800
2	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah**	**3 dokumen**	**5,430,342,969**	**DAU**		**3 dokumen**	**5,623,042,840**
4	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan	30 Orang/bulan	4,545,225,916	DAU		30 Orang/ bulan	4,843,985,340
5	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	885,043,053	DAU		12 Dokumen	778,900,000
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	74,000	DAU		1 laporan	157,500
3	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Jumlah laporan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah**	**2 laporan**	**143,800**	**DAU**		**2 laporan**	**334,900**
7	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 laporan	143,800	DAU		2 laporan	334,900
4	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**100%**	**133,200,000**	**DAU**		**100%**	**139,860,000**
8	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	32 Orang	133,200,000	DAU		32 Orang	139,860,000
5	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100%**	**1,031,028,945**	**DAU**		**100%**	**771,283,600**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
9	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	1,497,600	DAU		1 paket	1,572,500
10	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket	957,913,045	DAU		5 Paket	583,557,000
11	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 Paket	13,441,000	DAU		3 Paket	10,119,900
12	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	9,311,900	DAU		2 Paket	7,456,400
13	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	8,902,400	DAU		12 Dokumen	9,554,200
14	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	39,963,000	DAU		12 Laporan	50,243,600
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	0	0	0		1 Dokumen	108,780,000
6	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintaah Daerah yang Disediakan**	**100%**	**481,733,580**	**DAU**		**100%**	**496,686,000**
15	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	5,750,000	DAU		12 Laporan	8,925,000
16	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	354,043,580	DAU		12 Laporan	341,349,000
17	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	121,940,000	DAU		12 Laporan	146,412,000
7	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Barang Milik Daerah (BMD) Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Dipelihara**	**4 unit**	**33,000,000**	**DAU**		**4 unit**	**30,319,000**
18	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 unit	33,000,000	DAU		4 unit	30,319,000
II	**PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL**	**Persentase Pelaku usaha yang diberikan insentif/fasilitas di bidang penanaman modal**	**25%**	**203,434,000**	**DAU**		**100%**	**275,305,457**
8	**Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif di Bidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota**	**Jumlah dokumen yang disusun atas penetapan pemberian fasilitas/insentif di bidang penanaman modal**	**2 dokumen**	**69,082,800**	**DAU**		**2 dokumen**	**177,732,957**
19	Penetapan kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	1 dokumen	46,017,800	DAU		1 dokumen	119,127,000
20	Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah	1 Dokumen	23,065,000			1 Dokumen	58,605,957

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
9	**Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota**	**Jumlah Dokumen RUPM, Peta potensi dan peluang usaha yang disusun**	**2 dokumen**	**134,351,200**	**DAU**		**2 dokumen**	**97,572,500**
21	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	1 dokumen	70,032,700	DAU		1 dokumen	51,035,000
22	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	1 dokumen	64,318,500	DAU		1 dokumen	46,537,500
III	**PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL**	**Prosentase pelaksanaan strategi dan kegiatan promosi yang dilaksanakan**	**100%**	**349,987,300**	**DAU**		**100%**	**260,813,407**
10	**Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota.**	**Jumlah media promosi, market inteligent, publikasi dan kegiatan promosi yang dilakukan**	**3 Dokumen**	**349,987,300**	**DAU**		**3 Dokumen**	**260,813,407**
23	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten Kediri	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	2 Dokumen	279,394,300	DAU		2 Dokumen	182,636,907
24	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota	1 Dokumen	70,593,000	DAU		1 Dokumen	78,176,500
IV	**PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL**	**Prosentase pelayanan perizinan dan non perizinan secara terpadu satu pintu**	**100%**	**649,278,507**	**DAU**		**100%**	**486,021,263**
11	**Pelayanan Perizinan dan non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten / Kota.**	**Prosentase ijin dan pemenuhan komitmen terbit dan selesai**	**80%**	**649,278,507**	**DAU**		**80%**	**486,021,263**
25	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	10000 Pelaku Usaha	561,364,507	DAU		10000 Pelaku Usaha	398,107,283
26	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	100 Pelaku Usaha	87,914,000	DAU		100 Pelaku Usaha	87,913,980
V	**PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL**	**Persentase Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang dilaksanakan**	**85%**	**275,886,200**	**DAU**		**85%**	**287,833,901**
12	**Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota**	**Jumlah perusahaan yang dilaksanakan pengendalian**	**380 perusahaan**	**275,886,200**	**DAU**		**474 Perusahaan**	**287,833,901**
27	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	5 Kegiatan Usaha	23,548,300	DAU		5 Kegiatan Usaha	29,537,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
28	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	300 Pelaku Usaha	161,127,600	DAU		350 Pelaku Usaha	164,463,050
29	Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku DIlakukan Inspeksi Lapangan ; serta DIlakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	75 Kegiatan Usaha	91,210,300	DAU		50 Kegiatan Usaha	93,833,851
VI	**PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL**	**Prosentase pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal**	**100 persen**	**189,093,040**	**DAU**		**100 persen**	**110,374,579**
13	**Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten / Kota.**	**Jenis Penyajian Data dan Informasi perizinan**	**3 jenis**	**189,093,040**	**DAU**		**3 jenis**	**110,374,579**
30	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	3 Dokumen	189,093,040	DAU		13 Dokumen	110,374,579

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Program dan kegiatan yang dituangkan dalam Dokumen Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Tahun 2026 adalah sebagai upaya yang terencana untuk pencapaian visi dan misi kepala daerah, yang secara operasional diterjemahkan dalam pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah pada tahun 2026.

Dengan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, yang telah secara rinci menetapkan program, kegiatan, dan sub kegiatan pada satuan kerja perangkat daerah, maka Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Kediri Tahun 2026 dituangkan ke dalam 6 (enam) program, diuraikan ke dalam 13 (tiga belas) kegiatan, dan dirincikan ke dalam 30 (tiga puluh) sub kegiatan, yaitu :

I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dengan kegitan:
   1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, yang dirinci ke dalam sub kegiatan:
      1.1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
      1.2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
      1.3. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
   2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, yang dirinci ke dalam sub kegiatan:
      2.1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
      2.2. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN;
      2.3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
   3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah, yang dirinci ke dalam sub kegiatan:
      3.1. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
   4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
      4.1. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan;
   5. Administrasi Umum Perangkat Daerah, yang dirinci ke dalam sub kegiatan:
      5.1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
      5.2. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor;
      5.3. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga;

5.4. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan;
5.5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan;
5.6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD;

6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, yang dirinci ke dalam sub kegiatan:
   6.1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
   6.2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
   6.3. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, yang dirinci ke dalam sub kegiatan:
   7.1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;

II. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal, dengan kegitan:
1. Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif di Bidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota, yang dirinci ke dalam Sub Kegiatan:
   1.1. Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal
   1.2. Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota
2. Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota, yang dirinci ke dalam Sub Kegiatan:
   2.1. Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota
   2.2. Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota

III. Program Promosi Penanaman Modal, dengan kegiatan:
1. Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota, yang dirinci ke dalam Sub Kegiatan:
   1.1. Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten Kediri
   1.2. Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota

IV. Program Pelayanan Penanaman Modal, dengan kegitan:
1. Pelayanan Perizinan dan non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten / Kota, yang dirinci ke dalam Sub Kegiatan:
   1.1. Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik;
   1.2. Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan non Perizinan.

V. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, dengan kegitan:

1. Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota, yang dirinci ke dalam Sub Kegiatan:
    1.1. Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya
    1.2. Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha;
    1.3. Pengawasan Penanaman Modal

VI.Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal, dengan kegitan:

1. Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten / Kota, yang dirinci ke dalam Sub Kegiatan:
    1.1. Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik.

Adapun rumusan program/kegiatan dan pendanaan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Kediri Tahun 2026 disajikan dalam bentuk matrik sebagaimana pada tabel 4.1 berikut :

Tabel 41

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2026
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2026				
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting
2 18	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL**				**8,777,570,141**		
2 18 01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**100%**	**7,109,891,094**	**APBD**	
2 18 01 201	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		**10 dokumen**	**441,800**	**APBD**	
2 18 01 201 0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	DPMPTSP	2 Dokumen	154,200	APBD	
2 18 01 201 0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil	DPMPTSP	2 laporan	143,800	APBD	
2 18 01 201 0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	DPMPTSP	6 Laporan	143,800	APBD	
2 18 01 202	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah**		**3 dokumen**	**5,430,342,969**	**APBD**	
2 18 01 202 0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	DPMPTSP	30 Orang/bulan	4,545,225,916	APBD	
2 18 01 202 0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	DPMPTSP	12 Dokumen	885,043,053	APBD	
2 18 01 202 0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	DPMPTSP	1 laporan	74,000	APBD	
2 18 01 203	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Jumlah laporan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah**		**2 laporan**	**143,800**	**APBD**	
2 18 01 203 0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	DPMPTSP	2 laporan	143,800	APBD	
2 18 01 205	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**		**100%**	**133,200,000**	**APBD**	
2 18 01 205 0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	DPMPTSP	32 Orang	133,200,000	APBD	
2 18 01 206	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**100%**	**1,031,028,945**	**APBD**	
2 18 01 206 0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang	DPMPTSP	1 paket	1,497,600	APBD	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2026				
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting
2 18 01 206 0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	DPMPTSP	6 Paket	957,913,045	APBD	
2 18 01 206 0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang	DPMPTSP	3 Paket	13,441,000	APBD	
2 18 01 206 0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	DPMPTSP	2 Paket	9,311,900	APBD	
2 18 01 206 0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	DPMPTSP	12 Dokumen	8,902,400	APBD	
2 18 01 206 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab Kediri dan Luar Daerah	12 Laporan	39,963,000	APBD	
2 18 01 208	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintaah Daerah yang Disediakan**		**100%**	**481,733,580**	**APBD**	
2 18 01 208 0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	DPMPTSP	12 Laporan	5,750,000	APBD	
2 18 01 208 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	DPMPTSP	12 Laporan	354,043,580	APBD	
2 18 01 208 0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	DPMPTSP	12 Laporan	121,940,000	APBD	
2 18 01 209	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Barang Milik Daerah (BMD) Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Dipelihara**		**4 unit**	**33,000,000**	**APBD**	
2 18 01 209 0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	DPMPTSP	4 unit	33,000,000	APBD	
2 18 02	**PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL**	**Persentase Pelaku usaha yang diberikan insentif/fasilitas di bidang penanaman modal**		**25%**	**203,434,000**	**APBD**	
2 18 02 201 01	**Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif di Bidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota**	**Jumlah dokumen yang disusun atas penetapan pemberian fasilitas/insentif di bidang penanaman modal**		**2 dokumen**	**69,082,800**	**APBD**	
2 18 02 201 0001	Penetapan kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	DPMPTSP	1 dokumen	46,017,800	APBD	
2 18 02 201 0003	Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah	Kab Kediri dan Luar Daerah	1 Dokumen	23,065,000		
2 18 02 202	**Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota**	**Jumlah Dokumen RUPM, Peta potensi dan peluang usaha yang disusun**		**2 dokumen**	**134,351,200**	**APBD**	
2 18 02 202 0001	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	DPMPTSP	1 dokumen	70,032,700	APBD	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2026				
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting
2 18 02 202 0004	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	DPMPTSP	1 dokumen	64,318,500	APBD	
2 18 03	**PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL**	**Prosentase pelaksanaan strategi dan kegiatan promosi yang dilaksanakan**		**100%**	**349,987,300**	**APBD**	
2 18 03 201	**Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota**	**Jumlah media promosi, market inteligent, publikasi dan kegiatan promosi yang dilakukan**		**3 Dokumen**	**349,987,300**	**APBD**	
2 18 03 201 0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten Kediri	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	Kab Kediri dan Luar Daerah	2 Dokumen	279,394,300	APBD	
2 18 03 201 0003	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota	Kab Kediri	1 Dokumen	70,593,000		
2 18 04	**PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL**	**Prosentase pelayanan perizinan dan non perizinan secara terpadu satu pintu**		**100%**	**649,278,507**	**APBD**	
2 18 04 201	**Pelayanan Perizinan dan non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten / Kota**	**Prosentase ijin dan pemenuhan komitmen terbit dan selesai**		**80%**	**649,278,507**	**APBD**	
2 18 04 201 0006	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	DPMPTSP	10000 Pelaku Usaha	561,364,507	APBD	
2 18 04 201 0007	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Kab Kediri	100 Pelaku Usaha	87,914,000	APBD	
2 18 05	**PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL**	**Persentase Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang dilaksanakan**		**85%**	**275,886,200**	**APBD**	
2 18 05 201	**Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota**	**Jumlah perusahaan yang dilaksanakan pengendalian**		**380 perusahaan**	**275,886,200**	**APBD**	
2 18 05 201 0004	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Kab Kediri	5 Kegiatan Usaha	23,548,300	APBD	
2 18 05 201 0005	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Kab Kediri	300 Pelaku Usaha	161,127,600	APBD	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2026				
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting
2 18 05 201 0006	Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku DIlakukan Inspeksi Lapangan ; serta DIlakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	Kab Kediri	75 Kegiatan Usaha	91,210,300	APBD	
2 18 06	**PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL**	**Prosentase pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal**		**100 persen**	**189,093,040**	**APBD**	
2 18 06 201	**Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten / Kota**	**Jenis Penyajian Data dan Informasi perizinan**		**3 jenis**	**189,093,040**	**APBD**	
2 18 06 201 0002	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	Kab Kediri	3 Dokumen	189,093,040	APBD	

BAB V

P E N U T U P

Seperti diuraikan di dalam dokumen Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kediri ini telah diuraikan hasil pembangunan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu tahun lalu, yaitu Tahun 2024 dan Rencana Kerja tahun 2026 beserta indikator program/kegiatan dan besaran pagu indikatif pendanaannya.

Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kediri Tahun 2026 ini merupakan rencana kerja tahunan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kediri dalam menunjang tercapainya Visi dan Misi Bupati serta target dan Sasaran Pembangunan yang dioperasionalkan melalui Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kediri Tahun 2026. Dengan demikian Rencana Kerja ini, di samping dimaksudkan untuk mengevaluasi pelaksanaan rencana kerja Tahun lalu, juga sebagai bahan dalam penyusunan usulan rencana kegiatan fasilitasi pembangunan yang bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2026.

Besaran rancangan pagu indikatif pendanaan atas rencana program dan kegiatan selama Tahun 2026 memang telah ditetapkan. Namun demikian, dalam kurun waktu pelaksanaan rencana kerja sangat dimungkinkan adanya perubahan situasi dan kondisi yang tidak mampu terdeteksi saat awal perencanaan, baik faktor alam, kebutuhan internal/eksternal, maupun kemampuan pembiayaan atas program dan kegiatan. Bila hal ini terjadi, maka perubahan atas rencana kerja akan sangat dimungkinkan. Pada kondisi seperti ini evaluasi atas rencana program dan kegiatan merupakan hal yang sangat penting dan tetap senantiasa dilakukan dengan tetap mengacu pada prioritas program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam kebijakan pembangunan Kabupaten Kediri Tahun 2026.

Pelaksanaan atau penerapan atas rencana program dan kegiatan yang tertuang dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kediri mengacu pada beberapa kaidah, yaitu:

a. Dokumen merupakan dasar penetapan penyusunan belanja kegiatan yang dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2026 yang menetapkan belanja hingga sampai pada operasional belanja yang dituangkan dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK) Kegiatan dan Sub Kegiatan;

b. Dalam kurun waktu pelaksanaan rencana kerja perlu senantiasa dilakukan evaluasi untuk menjawab perubahan situasi dan kondisi yang tidak mampu terdeteksi pada awal perencanaan. Evaluasi juga sebagai alat ukur ketercapaian (efektifitas) pelaksanaan program dan kegiatan;
c. Apabila terjadi perubahan pada Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kediri Tahun 2026, maka kaidah yang diambil adalah memprioritaskan kebutuhan yang lebih mendesak, dengan tetap mengacu pada prioritas program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam kebijakan pembangunan Kabupaten Kediri Tahun 2026;
d. Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kediri Tahun 2026 harus dilaksanakan secara transparan, terukur, efektif-efisien dan akuntabel.

Selanjutnya, kami berharap dengan adanya Renja ini, penyelenggaraan program/ kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Kediri Tahun 2026 mampu memberikan sumbangsih bagi pelayanan kinerja di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu, bagi pemangku kepentingan, dan legih luas bagi kepentingan pembangunan Kabupaten Kediri dan Masyarakat Kabupaten Kediri.

Kediri, - - 2025

KEPALA DPMPTSP
KABUPATEN KEDIRI

JOKO SUWONO

BUPATI KEDIRI,

HANINDHITO HIMAWAN PRAMANA